

**PENGARUH OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR  
PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Kab. OKU Selatan Tahun 2006-2017)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh**

**NURLELA**

**NPM : 1451010225**

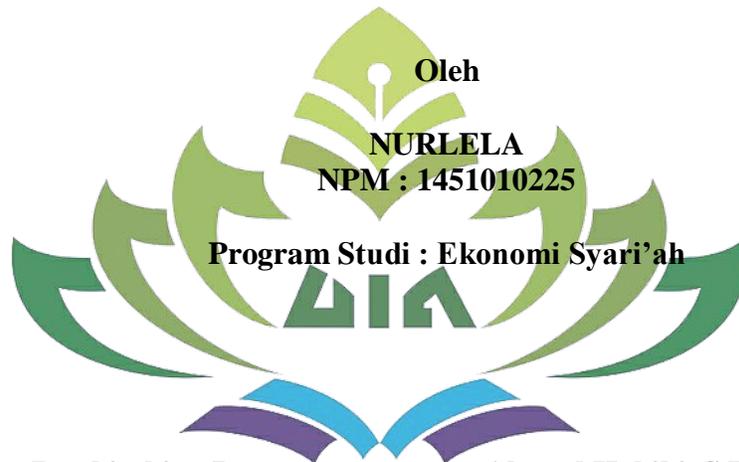
**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**PENGARUH OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR  
PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Kab. OKU SELATAN Tahun 2006-2017)**

**Skripsi**

**Di ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E**

**Pembimbing II : Deki Fermansyah, S.E., M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018**

## ABSTRAK

### **PENGARUH OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2017)**

Oleh :  
Nurlela

Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pada peningkatan pendapatan asli daerah di dominasi oleh kontribusi penerimaan pajak dan retribusi. Namun berbeda dengan Kabupaten OKU Selatan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan didominasi oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 57% lalu penerimaan pajak sebesar 18% dan penerimaan retribusi sebesar 17% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah hanya 7%. OKU selatan memiliki beragam objek wisata yang memiliki potensi untuk di kembangkan. Banyaknya objek wisata ini belum dapat mendorong penerimaan pajak dan retribusi pada sektor pariwisata menjadi sektor *primer mover* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten OKU Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Apakah pajak sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017?. b). Apakah retribusi sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017?. c). Bagaimanakah pajak dan retribusi sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017 ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : a). Pengaruh pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017. b). Pengaruh retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017. c). Dan untuk mengetahui pajak dan retribusi sektor pariwisata ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dari data laporan BPPRD OKU Selatan tahun 2006-2017 dan analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: a). Pajak sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. b). Retribusi sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. c). Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata diperbolehkan dengan pemungutan pajak dan retribusi yang dilaksanakan ini dengan system pemungutan perpajakan yang adil dan yang selaras dengan spirit Islam. Pemungutan pajak dan retribusi ini dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9) : 29).

Kata kunci: Pajak, Retribusi, Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

(Studi pada Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2017)

Nama Mahasiswa : Nurlela

NPM : 1451010225

Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**  
NIP. 197905142003121003

Bandar Lampung,  
Pembimbing II

April 2018

**Deki Fermansyah, S.E., M.Si**  
NIP. 1987060420150310006

Ketua jurusan

**Madnasir, S.E., M.Si**  
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. (Studi pada Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2017)”** Disusun oleh **NURLELA NPM 1451010225, Jurusan Ekonomi syari’ah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam pada Hari/Tanggal : **Senin, 04 Juni 2018.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Hanif, S.E., M.M** (.....)

**Sekretaris : Agus Kurniawan, M.S.Ak** (.....)

**Penguji I : Ahmad Habibi, S.E., M.E** (.....)

**Penguji II : M. Iqbal, S.E.I., M.E.I** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh Bahrudin, M.A**  
**NIP. 195808241989031003**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. ( Q.S An-Nisa (4) : 58)*





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama Mahasiswa : Nurlela**  
**NPM : 1451010225**  
**Jurusan : Ekonomi Syaria'ah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Pada Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2017)”** adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya padapenyusun.

Demikian surat pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, April 2018  
Penyusun

**NURLELA**  
**NPM 1451010225**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Muslimin dan Ibu Aisyah, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a-do'anya. Yang selalu menguatkan ku dalam keadaan apapun selalu memberikan nasihat, selalu memberikan dukungan kepada ku, dan setiap saat selalu mengingatkan ku agar selalu ada dalam Jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adik semata wayangku Sri Setya Wati, terimakasih atas do'a-do'amu dan sudah menjadi penyemangat, dan pendukung selama ini.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Raden Intan Lampung semoga makin jaya, maju dan berkualitas.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nurlela, dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 10 Juli 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Muslimin dan Ibu Aisyah Wati.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah :

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Tanjung Kari selesai pada tahun 2008.
2. SLTP yaitu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pulau Beringin selesai pada tahun 2011.
3. SLTA yaitu di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan dan lulus pada tahun 2014.

Kemudian penulis masuk PTN yaitu pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan Ekonomi Syari'ah melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMPTAIN) pada tahun 2014.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DiTinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2017)” dapat diselesaikan. Shalawat beriringkan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerja sama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

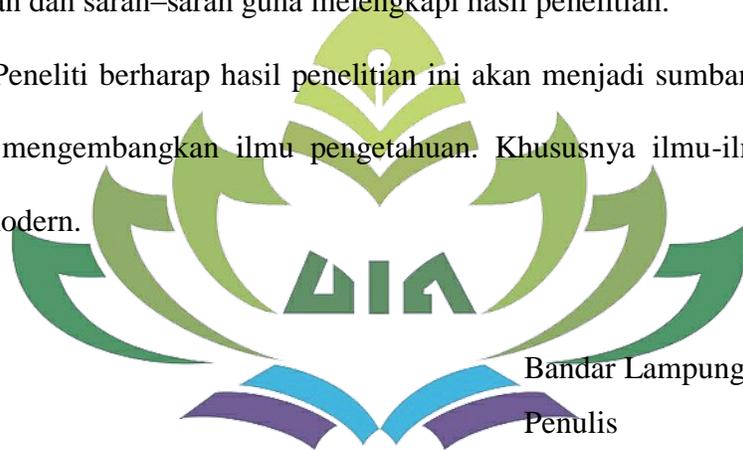
1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa/i.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Ahmad Habibi, S.E.,M.E selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Deki Fermansyah, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Hanif, S.E.,M.M, Ahmad Habibi, S.E.,M.E, M. Iqbal, S.E.I.,M.E.I, dan Agus Kurniawan,M.S.Ak selaku tim penguji dalam sidang Munaqosyah terimakasih masukan dan motivasi serta bimbingannya.
6. Para staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
8. Para staf dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, universitas, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi dalam menunjang terselesainya skripsi ini.
9. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) OKU Selatan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
10. Teman seperjuangan untuk Arif, Mul, Eni, Putri, Lilis, Riko, Mardiah, dan teman-teman khususnya kelas C, Jurusan Ekonomi Syari'ah, angkatan 2014 yang selalu bersama-sama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman satu bapak dan satu perjuangan Intan suri mahardika pertiwi, S.E semoga menyusul kesuksesan yang lain untuk kita.
12. Dwi Puspita Sari, S.E. terimakasih atas bantuan dan supportnya atas penyelesaian skripsi ini.
13. Teman seperjuangan Mahda Henna, Inti Bintang Fortuna dan Rizki Amalia terimakasih atas motivasi terbaik dari kalian.
14. Umi Fitriyani dan Muhammad Sofe'i terimakasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabatku Ade Aria Junita Batari, S.pd dan Uswatun Hasanah,S.Sos terimakasih sudah menjadi teman curhat terbaik atas keluh kesah, suka duka dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran–saran guna melengkapi hasil penelitian.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern.



Bandar Lampung, April 2018  
Penulis

**NURLELA**  
**NPM 1451010225**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	16
B. Konsep Pajak .....	20
1. Pengertian Pajak .....	20
2. Fungsi Pajak .....	21
3. Pembagian dan Jenis pajak .....	22
4. Syarat Pemungutan Pajak .....	25
5. Asas-Asas Pemungutan Paja .....	26
6. Sistem pemungutan pajak .....	27
C. Jenis Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata .....	29
1. Pajak Hotel .....	30
2. Pajak Restoran .....	33
3. Pajak Hiburan .....	35
D. Konsep Retribusi .....	38
1. Pengertian Retribusi .....	38
2. Objek Retribusi .....	40
E. Jenis Retribusi Sektor Pariwisata .....	41

1. Retribusi Rekreasi dan Olahraga .....	41
2. Retribusi Khusus Parkir.....	43
3. Retribusi Penginapan/Villa.....	44
F. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak dan Retribusi Dalam Ekonomi Islam .....	45
1. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Islam .....	45
2. Pajak dan Retribusi Dalam Ekonomi Islam.....	48
G. Penelitian Terdahulu.....	56
H. Kerangka Pemikiran .....	63
I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis .....	65

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	69
B. Jenis dan Sumber Data .....	71
C. Teknik Pengumpulan Data .....	71
D. Populasi dan Sampel.....	72
E. Definisi Operasional Variabel.....	73
F. Metode Analisis Data .....	75

<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	81
1. Gambaran Umum Kabupaten OKU Selatan .....	81
2. Gambaran Profil Objek Wisata OKU Selatan .....	83
3. Gambaran Sarana dan Prasarana OKU Selatan .....	85
B. Gambaran Hasil Penelitian .....	88
1. Pendapatan Asli Daerah.....	88
2. Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata.....	93
3. Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata.....	95
C. Analisis Data .....	97
1. Uji Asumsi Klasik .....	98
a) Uji Normalitas.....	98
b) Uji Multikolinearitas.....	98
c) Uji Autokorelasi.....	99
d) Uji Heteroskedastisitas .....	99
2. Analisis Regresi Linear Berganda .....	100
3. Hasil Uji Hipotesis.....	102
a) Uji Signifikan Parsial (Uji T) .....	102
b) Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	103
c) Uji Koefisien Determinasi .....	104
D. Pembahasan .....	105
1. Pengaruh Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan	

Asli Daerah Di Kabupaten OKU Selatan padatahun 2006-2017.....	105
2. Pengaruh Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2006-2017.....	108
3. Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam .....	111

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	



## DAFTAR TABEL

Tabel	hlm
1. Total realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017 .....	89
2. Total realisasi pajak sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2006-2017 .....	93
3. Realisasi retribusi sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2006-2017 .....	96
4. Hasil uji normalitas pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten OKU Selatan.....	98
5. Hasil uji multikolinearitas pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten OKU Selatan.....	98
6. Hasil uji autokorelasi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten OKU Selatan.....	99
7. Hasil uji heteroskedastisitas – <i>white</i> pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten OKU Selatan .....	99
8. Hasil uji regresi linear berganda.....	100
9. Hasil uji T untuk pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) .....	102
10. Hasil Uji F untuk pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	hlm
1. Persentase pertumbuhan pajak dan retribusi sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2006-2017 .....	11
2. Kerangka pemikiran penelitian .....	64
3. Peta administrasi Kabupaten OKU Selatan .....	81
4. Persentase rata-rata kontribusi indikator pada pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2006-2017 .....	92
5. Rata-rata lama dan tingkat hunian hotel Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2006-2017 .....	106
6. Jumlah pengunjung objek wisata Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2006-2017 .....	107



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita acara seminar proposal skripsi
Lampiran 2	SK pembimbing
Lampiran 3	Surat riset/ penelitian
Lampiran 4	Berita acara sidang munaqosyah
Lampiran 5	Surat riset KESBANG POOL
Lampiran 6	Surat riset BPPRD
Lampiran 7	Hasil output uji asumsi klasik
Lampiran 8	Hasil output <i>evIEWS</i> regresi berganda
Lampiran 9	Tabel uji T
Lampiran 10	Tabel uji F
Lampiran 11	Data /laporan realisasi PAD Kabupaten OKU SELATAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah sebagai berikut **Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam** (Studi pada Kab. OKU Selatan Tahun 2006-2017). Adapun istilah yang dipakai adalah :

1. **Pengaruh** adalah kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. **Optimalisasi** adalah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>2</sup>  
Optimalisasi adalah proses pencarian proses pencarian solusi terbaik, tidak

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV, Penerbit Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.1053

<sup>2</sup>Tim prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press. 2015), h.562

selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>3</sup>

3. **Pajak** adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>4</sup>
4. **Retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>5</sup> Retribusi tempat obyek wisata merupakan pendapatan yang bersumber dari hal-hal yang ada di dalam obyek wisata.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta :Graham Ilmu, 2005), h.4.

<sup>4</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 7.

<sup>5</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). (Yogyakarta : ANDI), h. 12.

<sup>6</sup>Sunarto Reni Dyah Ayu Nur Fatimah. “*Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015*”. *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No. 2 ( Desember 2016), h. 94.

5. **Sektor Pariwisata** adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.<sup>7</sup>
6. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.<sup>8</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami maksud ri judul ini adalah Pengaruh Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kab. OKU Selatan Tahun 2006-2017).

## B. Alasan Memilih Judul

Dipilihnya judul penelitian ini yaitu dengan alasan sebagai berikut :

### 1. Secara Objektif

Berdasarkan dari pengamatan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU

---

<sup>7</sup>Happy Merpaung, *Pengetahuan Kepariwisata* (Bandung : Alfabeta, 2002), h. 14.

<sup>8</sup>Abdul. Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). (Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal), h.103.

<sup>9</sup>Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2008), h.19

Selatan di dominasi oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 57% lalu penerimaan pajak sebesar 18% dan penerimaan retribusi sebesar 17% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah hanya 8%.

Peningkatan pajak dan retribusi daerah dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan sub-sektor yang ada, untuk menambah penerimaan pajak, dalam pengamatan yang dilakukan pada Kabupaten OKU Selatan, penerimaan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah, hal ini diketahui dengan berkembangnya dan banyaknya objek pariwisata OKU Selatan yang dapat memberikan sumbangsih pada penerimaan daerah, namun dalam realisasi hasil penerimaan sektor pariwisata OKU selatan belum memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan daerah hal ini dibuktikan dengan penerimaan sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan bahwa sumbangsih penerimaan pajak sektor pariwisata 14% dan penerimaan retribusi 11% pada pajak dan retribusi.

Kecilnya kemampuan pajak dan retribusi daerah dalam menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa banyak nya sektor pariwisata OKU Selatan belum dapat menjadi sektor *primer mover* dalam peningkatan pendapatan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui *Pengaruh Optimalisasi*

*Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.*

## **2. Secara Subjektif**

Alasan subjektif dari judul ini adalah karena pokok bahasan skripsi ini relevan dengan spesialisasi keilmuan penulis pelajari di jurusan Ekonomi Syariah serta didukung oleh tersedianya literatur yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini yaitu data yang diperoleh secara sekunder yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan, serta adanya motivasi serta tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yang tersedia dipergustakaan, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

## **C. Latar Belakang Penelitian**

Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional dan merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan peningkatan pendapatan negara baik dari pendapatan masyarakat dan menambah devisa negara yang bersangkutan. Adanya pariwisata dapat dijadikan sebagai *Katalisator* untuk kegiatan pembangunan pada pariwisata dan merupakan salah satu penggerak untuk bermacam-macam kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata dianggap sebagai suatu yang strategis untuk mendorong

pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>10</sup> Marpaung mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.<sup>11</sup> Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing dan juga indikator pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan pajak hotel dan pajak yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan.

Kegiatan pada sektor pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat penting.

---

<sup>10</sup> Herry Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah :Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), h.33-34.

<sup>11</sup> Happy Merpaung, *Pengetahuan Kepariwisata* (Bandung : Alfabeta, 2002), h.14.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.<sup>12</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah.<sup>13</sup>

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud.

Sektor pariwisata memang bukan faktor penyumbang utama dalam pendapatan daerah, sektor pariwisata yang dilaksanakan secara optimal memberikan potensinya pada pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pariwisata dalam pertumbuhan pendapatan dilihat dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi pada sektor pariwisata daerah tersebut. Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut, suatu daerah akan dapat

---

<sup>11</sup> Aries A Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. (Bogor : Ghalia Indonesia.2012), h.88.

<sup>13</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 44.

mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya dengan meningkatkan sektor-sektor basis pada daerah tersebut yang dapat memberikan sumbangsih dan kontribusinya pada peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan.

Kemampuan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh suatu daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU NO.37 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, Ibu Kota Kabupaten OKU Selatan.<sup>14</sup> Dengan adanya otonomi daerah, maka suatu daerah dituntut agar bisa membangun daerahnya masing-masing dengan mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Sektor unggulan pada Kabupaten OKU Selatan adalah sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Namun demikian potensi di bidang sektor pariwisata yang dimiliki OKU Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 berdasarkan laporan data

---

<sup>14</sup>Profil oku selatan dalam angka tahun 2017

dari dinas pariwisata dan kebudayaan OKU Selatan, bahwa OKU Selatan memiliki 3 destinasi wisata yaitu wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya, ketiga wisata tersebut sangat menarik perhatian, dilihat dari perkembangannya objek wisata yang terdapat pada Dinas pariwisata dan kebudayaan berjumlah 112 objek wisata untuk dikunjungi. Dengan banyaknya objek wisata seharusnya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) OKU Selatan ter<sup>15</sup>.

Dengan terdapatnya berbagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Danau Ranau merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten OKU Selatan dan telah membuat Kabupaten ini terkenal di Sumatera Selatan. Selain itu terdapat Danau Rakihan, Danau Halim, dan Danau Umpungan yang potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata di Kabupaten OKU Selatan. Dengan adanya langkah dan optimalisasi yang dilakukan berdampak pada sektor pariwisata yang ada pada Kabupaten OKU Selatan, pada penerimaan pajak dan retribusi pajak yang berkaitan langsung dengan kegiatan wisata.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna mengukur tingkat otonomi daerah. Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah-

---

<sup>15</sup>Gambaran Wisata dan Budaya Okus/Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan – laporan dinas pariwisata dan kebudayaan, tersedia [www.disparbud.okus.go.id](http://www.disparbud.okus.go.id) di akses 20 Februari 2018.

daerah dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya untuk itu. Sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan ke dalam kedua kelompok utama yakni : sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan non-asli daerah (non PAD).

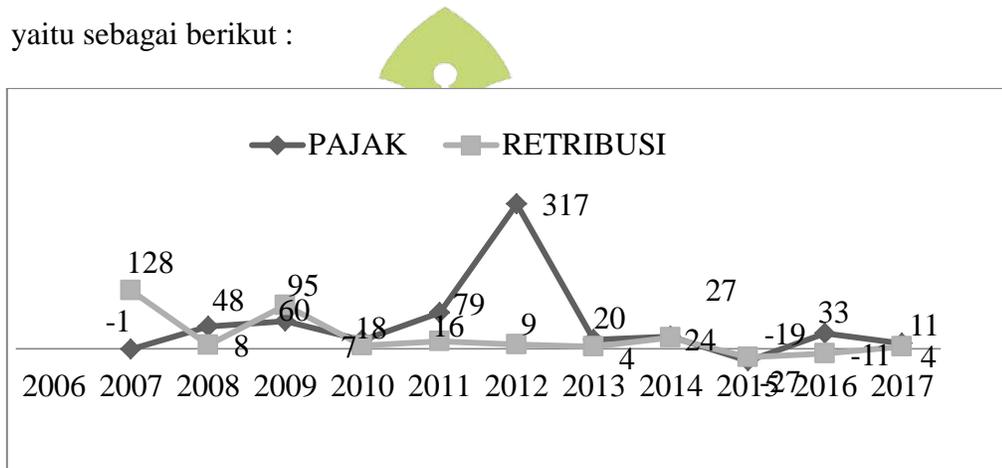
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah guna membiayai aktifitas daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) atau paling tidak pembiayaan rutinnya ditutup oleh hasil PAD.<sup>16</sup> Pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan dominan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah suatu daerah otonomi. Namun hal ini berbeda dengan Kabupaten OKU Selatan yang penerimaannya bukan didominasi oleh penerimaan pajak dan retribusi melainkan oleh penerimaan nonpajak hal ini didukung berdasarkan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan didominasi oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 57% lalu penerimaan pajak sebesar 18% dan penerimaan retribusi sebesar 17% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah hanya 8%.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Kaho Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 283.

<sup>17</sup>Laporan Ketua BPPRD OKU Selatan Tahun 2017 Dalam Pengoptimalan Pajak Dan Retribusi OKU Selatan.

Peningkatan pajak dan retribusi daerah dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan subsektor pada penerimaan tersebut. Dengan banyaknya objek wisata di OKU Selatan belum memberikan kontribusi pada penerimaan daerah, seharusnya dengan jumlah objek wisata yang banyak dapat memberikan sumbangsih pada penerimaan pajak dan retribusi daerah yang nantinya memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) OKU Selatan. Hal ini didukung dengan persentase pertumbuhan pajak dan retribusi sektor pariwisata yaitu sebagai berikut :



Gambar 1  
Persentase Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata  
Kabupaten OKU Selatan Tahun anggaran 2006-2017

Berdasarkan gambar diatas maka dapat diamati bahwa naik turunnya persentase pertumbuhan pajak dan retribusi pada sektor pariwisata di OKU Selatan belum stabil hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 persentase mencapai target, namun untuk tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan menurun dan maikin melemah pada tahun 2017. Berbeda dengan persentase pertumbuhan pajak sektor pariwisata persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 selanjutnya untuk

tahun- tahun berikutnya juga terjadi penurunan persentase pertumbuhan. Besar kecilnya pertumbuhan retribusi sektor pariwisata juga akan berdampak pada pencapaian hasil dan pemberian kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa banyaknya sektor pariwisata OKU Selatan belum dapat menjadi sektor *Primer Mover* dalam peningkatan pendapatan. Potensi pariwisata OKU Selatan dapat dijadikan sebagai *katalisator* dari kegiatan pembangunan kepariwisataan dan merupakan mata rantai panjang yang dapat menggerakkan bermacam-macam kegiatan dalam kehidupan masa depan dari daerah atau negara. Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk menganalisis *Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. OKU Selatan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.*

#### **D. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak sektor pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017?
2. Apakah retribusi sektor pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017?
3. Bagaimanakah pajak dan retribusi sektor pariwisata pada Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017 di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam ?

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pengaruh pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2006-2017 .
- b) Untuk mengetahui pengaruh retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2006-2017.
- c) Untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017.
- d) Untuk mengetahui pajak dan retribusi sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017 Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

### 2. Manfaat

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a) Secara Teoritis

Untuk digunakan sebagai literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai teori yang berkaitan dengan optimalisasi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan Bagi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan khususnya lembaga atau badan-badan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian yang dilakukan berkaitan dengan objek penelitian yang sama yaitu pajak dan retribusi sektor pariwisata.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>18</sup> Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut.<sup>19</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat

---

<sup>18</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.44.

<sup>19</sup>Audie O Niode, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, (Manado, 2013), h. 247 – 248.

<sup>20</sup>Abdul Halim., *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : STIM YKPN), h.113.

penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

## **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pajak Daerah**

Menurut Marihot pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

---

<sup>21</sup>Hadi. Sasana, Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* Vol. 18 No.1, (Maret 2011), h. 46-58.

pemerintahan dan pembangunan daerah<sup>22</sup> Selanjutnya menurut Syafrizal pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi diatas pajak daerah adalah pajak yang berasal dari daerah yaitu kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah sebagai bentuk kontribusi tanpa adanya imbalan langsung yang diberlakukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa.

#### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>24</sup> Menurut Ahmad Yani retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

---

<sup>22</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.7.

<sup>23</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Rajawali Pers: Jakarta,2014), h.393.

<sup>24</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2011), h.15.

pribadi atau badan.<sup>25</sup> Menurut Saragih adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang dipungut dan langsung mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran retribusi tersebut.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>27</sup> Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada

---

<sup>25</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.63.

<sup>26</sup> Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* ,(Jakarta : Ghallia Indonesia, 2003), h.65.

<sup>27</sup> Ahmad Yani, *Op. Cit*, h.73-74.

perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.<sup>28</sup>

#### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Menurut Undang-Undang No 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>29</sup> Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Undang- Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, tersedia di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) di akses 4 januari 2018.

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat 7 pasal 1 ayat 26. Tersedia di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Diakses 4 januari 2018.

<sup>30</sup> Aries Djaenuri, *Op. Cit* h. 99.

## B. Konsep Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran yang di kumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>31</sup>

Menurut Rochmat Soemitro mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>32</sup> Selanjutnya S.I. Djajadiningrat “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Hikmah, Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, *Jurnal Of Government – JOG* (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), Volume 2 Nomor 2 Januari – Juni 2017, h. 162.

<sup>32</sup> Rachmat, Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan. Erosco*, (Bandung : 2008), h. 1

<sup>33</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.1

Dari definisi pajak diatas, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.

## 2. Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Berikut dua fungsi pajak, yaitu:

### a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.<sup>34</sup> Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara/daerah sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.<sup>35</sup>

### b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

---

<sup>34</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2013), h.4

<sup>35</sup> Abdul Halim *Op.Cit*, h. 143

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>36</sup> Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.<sup>37</sup>

### 3. Pembagian Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:<sup>38</sup>

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga

---

<sup>36</sup> Diana Sari, *Log. Cit*

<sup>37</sup> Abdul Halim, *Log. Cit*, h.143

<sup>38</sup> Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Depkeu RI, <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=765>, diakses 23 November 2009.

dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
  - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
  - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- 4) Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

b. Pajak Daerah<sup>39</sup>

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:<sup>40</sup>

Pajak provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari berikut :<sup>41</sup>

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- 7) Pajak parkir.

---

<sup>39</sup>Dasar Hukum Pajak Daerah: UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>40</sup>*Ibid*, h.23.

<sup>41</sup>M. Zahari Ms, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangon, *Jurnal Eksis* Vol. 7 , No. 2, November 2016, h.136.

#### 4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

---

<sup>42</sup>Indra Mahardika, *Perpajakan : Edisi Tax Amnesty*, (Yogyakarta: Quadrant, 2017), h.16

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

## 5. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. *Equality* adalah pembebanan pajak di antara pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang ya di bawah perlindungan pemerintah. Jika *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.

---

<sup>43</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, (Jakarta:Salemba Empat, 2017) h. 25

Dalam keadaan yang sama, wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, wajib pajak harus diperlakukan berbeda..

- b. *Certainty* adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c. *Convenience of payment* adalah pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.
- d. *Economic of collection* adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak akan ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang diperoleh.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, sampai dengan tahun 1967, ada beberapa sistem pemungutan paja yang digunakan oleh Indonesia yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005), h.10.

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang..
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### C. Jenis Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata

Pariwisata atau turisme dapat dipahami sebagai industri jasa. Karena dimaknai sebagai industri, maka pariwisata bergerak dalam ranah pelayanan, mulai dari pelayanan jasa transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, sampai jasa-jasa lain yang bersangkutan seperti bank, asuransi, keamanan, dan sebagainya. Pariwisata juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya. Artinya seluruh aspek pelayanan yang dibutuhkan sepanjang perjalanan rekreatif masuk dalam kategori pariwisata.<sup>45</sup>

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>46</sup> Marpaung mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.<sup>47</sup> Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik

---

<sup>45</sup> Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Log. Cit*

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.33-34.

<sup>47</sup> Happy Merpaung, *Pengetahuan Kepariwisataaan* (Bandung : Alfabeta, 2002), h. 14.

maupun wisatawan asing dan juga indikator pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan pajak hotel dan pajak yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan.

Industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi. Adapun jenis penerimaan pajak dari sektor pariwisata terdiri dari :

## 1. Pajak Hotel

### a. Pengertian pajak hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah: pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>48</sup> Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisama pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10”

---

<sup>48</sup> Randy J.R.Walakandou, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni 2013, h. 722-729.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak hotel yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kemilikannya.

#### **b. Objek Pajak Hotel**

Objek dan subjek pajak menyatakan bahwa yang merupakan objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- 1) Gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.<sup>49</sup>
- 2) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan

---

<sup>49</sup> Sofia Dwi Yuliani, Et.Al, Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1, No. 1 2015, h. 7

atau dikelola hotel; dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.<sup>50</sup>

**Sementara tidak termasuk objek pajak hotel adalah:**

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

**c. Subjek dan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel**

Subjek pajak dari pajak hotel dimana menurut Peraturan daerah ini, yang menjadi subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Wajib pajak atas pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

---

<sup>50</sup> *Ibid, h. 9*

#### **d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak.**

Dasar pengenaan dari pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Dengan demikian setiap pembayaran yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak dari pajak hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.<sup>51</sup> Dengan kata lain perhitungan pajak hotel ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

## **2. Pajak Restoran**

### **a. Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.<sup>52</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 35 menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

<sup>52</sup> Edward W. Memah, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado, *Jurnal EMBA* 873 Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 871-881.

<sup>53</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2009), h.327-328.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran.

#### **b. Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.<sup>54</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran dimana pelayanan yang diberikan bukan merupakan jasa boga atau cetering dan bukan restoran dengan jumlah peredaran usaha dibawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

#### **c. Subjek dan Wajib Pajak untuk Pajak Restoran**

Subjek pajak dari pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak dari pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 329-330.

diberikan oleh pengusaha restoran. Adapun yang menjadi wajib pajak atas pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

#### **d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Dengan kata lain dasar pengenaan dari pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak restoran atas pelayanan-pelayanan yang telah dinikmati oleh konsumen. Perhitungan pajak restoran ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

### **3. Pajak Hiburan**

#### **a. Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak hiburan pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>55</sup> Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan kerana penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai

---

<sup>55</sup> Yulia Priskila Lumentah, Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado, *Jurnal EMBA* 1049 Vol.1 No.3 September 2013, h. 1049-1059.

kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota.

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, Terminologi tersebut adalah:<sup>56</sup>

- 1) Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik atas nama sendiri atau untuk atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- 3) Penonton atau penunjang adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menyadari untuk melakukan tugas pengawasan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah nilai uang yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h.1049-1059.

- 5) Tanda masuk adalah tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
- 6) Harga tanda masuk (HTM), adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar penonton atau pengunjung.
- 7) Bon penjualan atau bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak hiburan pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.

#### **b. Objek Pajak Hiburan**

Objek penyelenggara hiburan adalah setiap penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran, objek pajak hiburan terdiri dari: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, bowling, pacuan berkuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran, pertandingan olah raga. Namun ada juga beberapa objek pajak hiburan yang tidak dikenakan pajak atau dikecualikan yaitu penyelenggaraan

hiburan yang tidak dipungut bayaran, misalnya hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan.<sup>57</sup>

### c. Subjek dan wajib Pajak Hiburan

Dalam pajak hiburan, yang dimaksud dengan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.<sup>58</sup> Dengan demikian subjek pajak dan wajib pajak tentu berbeda peranan hak maupun kewenangan.

## D. Konsep Retribusi

### 1. Pengertian Retribusi

Definisi atau pengertian dari retribusi menurut Andrian Sutedi ialah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan”.<sup>59</sup> Sedangkan Munawir menyatakan bahwa “retribusi merupakan iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan atas jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan disini

<sup>57</sup> Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa, Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado, “online” tersedia <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 24 februari 2018.

<sup>58</sup> Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), h.562.

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.7.

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah tidak dikenakan iuran”.<sup>60</sup>

Sedangkan pengertian retribusi menurut Abdul Halim yaitu : “retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku”.<sup>61</sup>

Mengacu pada definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan timbal balik secara langsung dimana iuran ini dapat dipaksakan diteliti lebih dalam mengenai pengertian-pengertian diatas, terdapat hal yang membedakan antara retribusi dengan pajak, dimana retribusi dipungut dengan menghasilkan timbal balik secara langsung, sementara pajak tidak secara langsung memperoleh timbal balik.

---

<sup>60</sup>Kaho Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.170 .

<sup>61</sup> Abdul Halim *Op.Cit*, h.115

## 2. Objek Retribusi

Objek retribusi ini adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah, yang dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:<sup>62</sup>

- a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan AKTA catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.
- b) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan /atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi

---

<sup>62</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 64-71

rumah potong hewan, retribusi pelayanan. retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi daerah.

- c) Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis - jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.<sup>63</sup>

## E. Jenis Retribusi Sektor Pariwisata

### 1. Retribusi rekreasi dan olahraga

Dengan nama retribusi rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki

---

<sup>63</sup>Saidal arif, *Analisis Ekonomi Islam Tentang Pengembangan Objek Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam (Lampung, IAIN raden intan, 2015), h. 34-35.

dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>64</sup> Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>65</sup> Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan pada biaya administrasi, penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan obyek pariwisata.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

---

<sup>64</sup> Wirwan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004)

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang layak sebagai pengganti investasi, biaya pembinaan, biaya operasional dan biaya administrasi umum.

## 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>66</sup> Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan. Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan waktu

---

<sup>66</sup>Sistem Pemungutan Pajak Parkir “On-Line” tersedia di <http://bprd.go.id/pajak-parkir/> (24 Februari 2018)

penggunaan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah biaya administrasi, biaya pembangunan dan peralatan, biaya penyusutan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pengaturan, biaya kebersihan, keamanan, asuransi dan biaya pembinaan.

### 3. **Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa**

Retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, villa yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah provinsi untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>67</sup>

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik daerah atau pihak swasta. Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah provinsi.

Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dan pihak swasta. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

---

<sup>67</sup>Peraturan Daerah No.2 Tahun 2013, *Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa* “online”tersedia di <http://denpasar.bpk.go.id>. di akses 16 february 2018.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi tempat dan jenis penginapan/pesanggrahan/villa. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan fasilitas yang dimiliki tempat penginapan/pesanggrahan/villa itu berada dan jangka waktu pemakaian. Struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan keputusan gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **F. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak dan Retribusi Dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ranah Ekonomi Islam pendapatan daerah atau negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa sebagai berikut:<sup>68</sup>

#### a) Ghanimah

Di zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara di Madinah (622-632 M/ 1-10 H), sumber pendapatan negara terpenting dan terbesar adalah Ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan, yang kemudian harta itu dibagi sesuai dengan perintah Allah SWT pada QS. Al-Anfaal ayat 1 dan 41, yaitu 4/5 adalah hak pasukan, dan 1/5 dibagi untuk Allah SWT,

---

<sup>68</sup>Nurul Huda, et.al. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana,2012), h. 30.

Rasul dan kerabat beliau, Yatim, Miskin dan Ibnu Sabil. Dari harta Ghanimah inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, biaya hidup Nabi dan keluarga beliau, dan alat-alat perang, serta berbagai keperluan umum.

b) Fa'i

Yaitu harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran (QS. Al-Hasyr [59]:6), dibagikan untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak Yatim, Orang Miskin dan Ibnu Sabil. Fa'i dibagi lagi atas 3 macam yaitu;

- 1) Kharaj yaitu sewa tanah yang dipungut dari non Muslim.
- 2) Usyr yaitu bea masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham dan;
- 3) Jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer.

#### 4) Shadaqah atau Zakat<sup>69</sup>

Yaitu kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu, sesuai perintah Allah dalam QS At-Taubah (9):103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>70</sup> dan mensucikan<sup>71</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>72</sup>”

Demikianlah sumber-sumber pendapatan negara atau daerah yang utama dalam sistem Ekonomi Islam. Disamping pendapatan utama (primer) ada pula pendapatan sekunder yang diperoleh tidak tetap, yaitu: *ghulul*, *kaffarat*, *luqathah*, waqaf, uang tebusan, *khums/rikaz*, pinjaman, *amwal fadhla*, *nawa'ib*, hadiah, dan lain-lain.

Pada era berikutnya negara Islam semakin berkembang dan pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab, dibentuk program pembangunan

<sup>69</sup> Abu Ubaid dalam *Kitab Al Amwal*, Abu Yusuf dalam *Kitab Al Kharaj*, Ibnu Taimiyah dalam *Kitab Majmu'atul Fatawa* dan Imam Al Mawardi dalam *Kitab Al Ahkam Al Shulthaniyah*

<sup>70</sup> Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

<sup>71</sup> Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung :Diponegoro, 2014), h 191.

dimana pembiayaan negara bisa ditutupi dengan sumber dana yang ada akan tetapi dibutuhkan sumber dana yang lain seperti pajak.

## 2. Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata (*dhariba, yadhribu, dharban*), yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.<sup>73</sup> Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>74</sup>

Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah dan kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *zizyah dan kharaj*, sekalipun keduanya dikategorikan *dharibah*.<sup>75</sup>

Abdul Qodim Zallum berpendapat, pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan diwajibkan atas mereka,

---

<sup>73</sup> Gusfahmi,S.E, M.A, *Pajak Menurut Syariat* (Jakarta: Rajawali Pers 2011),h. 28

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 28.

pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/Harta<sup>76</sup>. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Zallum ini, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariat,

- a) Diwajibkan oleh Allah Swt.
- b) Objeknya adalah harta (al-Mal).
- c) Subjeknya kaum muslim yang kaya.
- d) Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim).
- e) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera dibatasi oleh Ulil Amri.<sup>77</sup>

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a) Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b) Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
- c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama
- d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

---

<sup>76</sup> Gusfahmi, h. 31

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 32

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya pajak yaitu sebagai berikut:

1) Pertama disebabkan ghanimah dan fay'i berkurang (bahkan tidak ada).

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan shahabat, pajak (*dharibah*) belum ada, karena dari pendapatan ghanimah dan fay'i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun setelah setelah ekspansi islam berkurang, maka ghanimah dan fay'i juga berkurang, bahkan sekarang tidak ada lagi karena kaum muslim sudah jarang berperang. akibatnya, pendapatan ghanimah dan fay'i tidak ada lagi, padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah).

2) Kedua, munculnya pajak (*dharibah*) karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Sungguhpun penerimaan zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum muslim, namun zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non muslim sebagaimana perintah Allah SWT pada QS. At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>78</sup>

Bahkan Rasulullah SAW yang juga adalah kepala negara selain Nabi, mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang zakat (*Fikhus Sunnah, Sayyid Sabiq*). Zakat juga ada batasan waktu (haul) yaitu setahun dan kadar minimum (nishab), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Tujuan penggunaan zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasul-Nya Muhammad SAW. Kaum muslim tidak boleh berijtihad didalam membuat tujuan zakat, sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara shalat, puasa, haji, dan ibadah mahdhah lainnya. pintu ijtihad untuk ibadah murni sudah tertutup.

- 3) Ketiga, munculnya pajak (*dharibah*) karena mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Bandung :Diponegoro, 2014), h, 156.

mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan pajak.

- 4) Keempat, sebab munculnya pajak (dharibah) adalah karena imam (khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara (baitul mal) kekurangan atau kosong (karena tidak ada ghanimah dan fay'i atau zakat), maka seorang imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka khalifah diperbolehkan berutang atau memungut pajak (*dharibah*). Jika terjadi kondisi baitul mal kekurangan atau kosong (karena tidak ada ghanimah dan fay'i atau zakat), maka seorang imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

Disaat pemerintah tidak membutuhkan dana dari rakyat karena ekonomi negara yang cukup stabil, maka pemerintah bisa saja tidak memungut pajak kecuali seperlunya saja. Namun lain halnya jika kondisi bangsa tertinggal dan memerlukan dana besar demi lancarnya

pembangunan, maka wajib bagi negara itu untuk menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut diatas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Selain dari pajak komponen pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari retribusi yang merupakan salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Menurut Waluyo, pemungutan retribusi diterapkan karena memiliki alasan yaitu adanya perbedaan *public goods*<sup>79</sup> dan *private goods*<sup>80</sup>, selanjutnya adanya masalah *efisiensi*<sup>81</sup>, artinya jika retribusi gratis maka umur kegiatannya akan menurun bila di bandingkan ada *charge*,<sup>82</sup> karena charge itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan juga mengontrol pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, selanjutnya adanya prinsip

---

<sup>79</sup> Barang publik diartikan barang yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang.

<sup>80</sup> Private goods adalah barang-barang yang melalui mekanisme pasar/ milik pribadi

<sup>81</sup> Efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya.

<sup>82</sup> Charge sama dengan ongkos atau harga

*benefit*<sup>83</sup> mereka yang mendapat kenikmatan harus membayar agar admistrasinya mudah dikelola.<sup>84</sup> Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang bersumber dari penerimaan harus dikelola optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak berlebih-lebihan.<sup>85</sup>

Dari uraian diatas bahwa dalam Islam pada dasarnya pelaksanaan Pendapatan Asli daerah, sebagai bentuk dari keuangan publik yang digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran daerah demi kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari komponen pajak dan retribusi. Pembayaran pajak dan retribusi itu sendiri sebagai salah satu bentuk dari *Istihlaf* (tanggung jawab) amanah dari individu atau badan yang dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan daerah yang wajib untuk dipatuhi sebagai pemimpin atau ulil amri masyarakat selagi pajak dan retribusi hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, salah satunya firman Allah untuk menaati ulil amri (pemerintah) sebagaimana firman Allah dalam QS An-nisa (4):59 :

---

<sup>83</sup> Benefit adalah bentuk imbal jasa atau dasar kebutuhan yang berguna untuk memperlancar proses kerja.

<sup>84</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013),h. 6.

<sup>85</sup> Fajar Hadianto, Format Keuangan Publik yang Islami, *Jurnal Ekonomi Islami*, Vol. IV, No.1, Juli (2010), h. 33.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
 شَيْءً فِي فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ  
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulim amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>86</sup>

Ulil Amri mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan kewajiban retribusi tersebut. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya” (HR Muslim).

Maka pajak menurut syariah, yaitu sesuatu yang diwajibkan atas obyeknya harta serta subyeknya kaum muslim yang kaya yang dapat memberikan tujuan untuk membiayai kebutuhan mereka serta diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri dengan tujuan pemungutan untuk memenuhi kemaslahatan umat guna mencegah kemudharatan dan membiayai pengeluaran-pengeluaran guna mencapai maqasid syariah dengan pendistribusian dan pembelajaran *Ad-Dharibah* tersebut secara

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Bandung :Diponegoro, 2014), h. 69.

adil, amanah dan jujur. Pemungutan retribusi juga dipandang sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan efisiensi dari pengelolaan objek yang berkenaan dengan retribusi tersebut, agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

### G. Penelitian Terdahulu

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Menurut Prastowo kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.<sup>87</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sili Antari, dengan judul penelitian peran industri pariwisata terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar yang mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Terbukti bahwa retribusi obyek wisata berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),h. 81.

<sup>88</sup> Ni Luh Sili Antari, *Log.Cit*, h. 35- 43

2. Penelitian yang dilakukan Robi Cahyadi, dengan judul penelitian pengaruh pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2009–2013 dengan metode penelitian regresi linear berganda, penelitian ini menghasilkan variabel pajak industri pariwisata memiliki pengaruh paling signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD) kedua variabel retribusi industri pariwisata juga berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD).<sup>89</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Kurnia Sari, dengan judul penelitian peranan retribusi obyek pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gresik dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif yang awalnya Rp500 pada tahun 2009-2010 menjadi Rp1000 on 2011, hal ini juga menyebabkan kenaikan pendapatan retribusi wisata religi Sunan Giri yang memberikan kontribusi sebesar 22,15% *on District Own Local Revenue*. Namun, pada tahun 2012 kontribusi menurun menjadi 18,71% yang disebabkan proporsi jumlah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat

---

<sup>89</sup>Robbi.Cahyadi, Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009–2013, *Jom FEKON* No. 2 Vol. 2 Oktober 2015.

dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 20,89% dikarenakan naiknya jumlah pengunjung.<sup>90</sup>

4. Hikmah, dengan judul penelitian analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam dengan hasil penelitian pajak dan retribusi daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).<sup>91</sup>
5. Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, dengan judul penelitian pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul tahun 2013-2015 menunjukkan hasil penelitian bahwa penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). sedangkan secara parsial penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penetapan tarif obyek wisata secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).<sup>92</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ibnu Marto, Abdul Hakim, Andy Fefta Wijaya, Ruth Nur Pratiwi dengan judul *The Performance of Revenue Office in the Perspective of New Public Management - (Study on*

---

<sup>90</sup> Nur Indah Kurnia Sari, Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik)

<sup>91</sup> Hikmah, *Log. Cit*

<sup>92</sup> Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, *Log. Cit*

*Performance of Local Tax Management in Makassar, Indonesia*) menurut penelitian mereka bahwa Pajak daerah merupakan sumber pemasukan daerah (PAD) yang dikelola langsung oleh Departemen Pendapatan (DISPENDA) sebagai organisasi publik. Pengukuran kinerja organisasi publik dilakukan dengan pendekatan keuangan (*Value for Money*) dengan indikator Efisien, Efektif dan Ekonomis (3E), penerapan konsep *New Public Management* (NPM) yang dipraktekkan di organisasi sektor publik. Jika tidak, pendekatan non finansial dilakukan dengan indikator akuntabilitas, tanggung jawab, dan daya tanggap; mengukur kepuasan pembayar pajak.

Hasil penelitian yang digunakan untuk kinerja program kegiatan anggaran, menunjukkan kinerja keuangan dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Pemkot Makassar, apakah telah memenuhi target dan nilai dasar pengukuran yang sesuai untuk uang. Sementara, kinerja pajak daerah berdasarkan indikator upaya pajak, efektifitas pajak dan efisiensi pajak menunjukkan potensi eksplorasi kawasan eksplorasi belum maksimal, namun pencapaian target anggaran dan penggunaan program mencakup kategori yang efektif dan efisien. Sedangkan pencapaian indikator kinerja non keuangan menunjukkan terkesan normatif terhadap akuntabilitas, tanggung jawab dan daya tanggap yang normalnya berjalan cukup baik.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Bambang Ibnu Marto, Abdul Hakim, Andy Fefta Wijaya, Ruth Nur Pratiwi, *The Performance of Revenue Office in the Perspective of New Public Management - (Study on*

7. Penelitian yang dilakukan Robert Tua Siregar, dengan judul penelitian pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah Kabupaten Simalungun menurut Robert, kegiatan wisata bisa diartikan sebagai proses yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke suatu tempat dan kembali ke tempat tempat itu berasal. Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan wisata disebut turis. Pariwisata pada prinsipnya sejumlah hubungan gejala yang dihasilkan dan meninggalkan orang asing, asalkan tempat tinggal mereka tidak menyebabkan kejadian tempat tinggal dan bisnis yang merupakan upaya pencarian pekerjaan sementara atau permanen sebagai penuh. Untuk itu dapat dilihat bahwa pada kenyataannya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sumber kabupaten simalungun (Pendapatan Asli Daerah).

Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam pariwisata sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan devisa dan pekerjaan serta kesempatan untuk mencoba. Dalam draf pembangunan nasional, untuk memperbaiki masyarakat kesejahteraan, garis besar haluan negara telah menentukan bahwa pengembangan pariwisata seharusnya dilakukan melanjutkan dan meningkatkan perluasan dan manfaat sumber dari sektor pariwisata maupun nasional potensi wisata menjadi kegiatan ekonomi dapat

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan untuk mencoba khususnya ke sekitarnya masyarakat menstimulasi pembangunan daerah, budaya dan identitas nasional<sup>94</sup>

8. Ade Saptomo melakukan penelitian dengan judul pengesahan dan implikasi hukum pajak pariwisata melalui pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan pendapatan lokal: perbandingan antara indonesia dan negara-negara maju, dengan hasil bahwa pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 2001 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki potensi destinasi wisata dapat mewujudkan tujuan otonomi melalui sektor ini. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Pertanyaan semacam itu dijawab oleh penelitian empiris di Kotamadya Bukit tinggi, Sumatera Barat. Sampelnya adalah Sungai Tanang.

Teori sengketa dan teknik analisis kasus kesulitan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini memerlukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan konflik, yaitu pakta hukum tercatat-pos. Akibatnya, kenaikan pendapatan daerah tidak hanya ditujukan bagi pemerintah daerah

---

<sup>94</sup> Robert Tua Siregar, dengan judul Penelitian The Influence Of Tourism Sector To The Income Of Simalungun Regency Area, *OSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) Volume 7, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), h. 06-11.*

tetapi juga bagi daerah untuk memiliki sumber air bersih. Sebagai implikasinya, daerah lain dapat mengadopsi konsep donasi dan pemerintah kota dapat mengadopsi konsep retribusi sehingga keduanya dapat meningkatkan pendapatan asli seperti yang telah dilakukan oleh negara maju di sektor pariwisata mereka.<sup>95</sup>

9. Ni Ketut Sari Adnyani dengan judul penelitian Analisis Korelasi Antara Pajak Perbaikan Dengan Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Singaraja Lovina (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng) mengatakan dari hasil penelitian, persentase tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng dalam menjalankan perannya sesuai dengan kewenangannya yang didasari dengan keberhasilan implementasi (realisasi) peraturan tersebut disesuaikan dengan target sektor pariwisata.

Di kawasan wisata lovina singaraja dikembangkan tingkat / tingkat klasifikasi hotel. Bisnis pariwisata berkembang pesat dan dorongan dari pemerintah buleleng. Pada dasarnya obyek wisata dan objek wisata di Kabupaten Buleleng cukup banyak dan beragam. Namun, hanya memperhatikan sisi penawaran saja, bukan dari sisi permintaan (market). Melaksanakan koordinasi antara instansi terkait termasuk Pemerintah

---

<sup>95</sup> Ade Saptomo, The Enactment And Legal Implication Of Tourism Tax Through The Water Resource Management For Increasing The Local Revenue: A Comparison Between Indonesia And Advanced Countries, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* Volume 8, Issue 9, September 2017, pp. 844–851, Article ID: IJCIET\_08\_09\_094 .

Buleleng yang terlibat dengan instansi terkait lainnya seperti: Dispenda, Departemen Kebudayaan & Pariwisata, Bappeda.<sup>96</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan dengan variabel penelitian yang berbeda penelitian ini hanya berkaitan dengan total penerimaan pajak dan retribusi sektor pariwisata, dengan tempat penelitian yang berbeda, dan pada penelitian yang dilakukan variabel dikaitkan dengan pandangan ilmu Ekonomi Islam.

#### H. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting.<sup>97</sup> Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Hubungan secara fungsional, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing.

---

<sup>96</sup> Ni Ketut Sari Adnyani Dengan Judul Penelitian Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District) *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 4, Issue 2 (June, 2015) h, 2289-1552.

<sup>97</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015),h.60



Berdasarkan kerangka pikir yang penulis buat maka gambaran kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada pajak sektor pariwisata akan mempengaruhi pada pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, begitu juga dengan retribusi sektor pariwisata apabila terjadi peningkatan pada pendatan retribusi hal ini akan memberikan pengaruh pada pendapatan asli daerah. Kedua variabel bebas yang terdapat di kerangka teori akan penulis uji secara simultan untuk mengetahui pengaruh keduanya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam pandangan ekonomi Islam sendiri bahwa anggaran pendapatan daerah merupakan sumber dana yang digunakan oleh pemerintah guna peningkatan kemaslahatan masyarakat. Sehingga pengoptimalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah harus digali secara optimal agar mencukupi kebutuhan

## I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan,<sup>98</sup> atau dugaan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol

---

<sup>98</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014),h.99

menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh antara variabel X dan Variabel Y. Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Variabel Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok.<sup>99</sup>

1. Pengaruh pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan

Penerimaan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penunjang pendapatan asli daerah, melalui penerimaan pos-pos kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sendiri.

Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Evi Apriani, Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, Ni Gst. Wira Wati, Dewi Mentari, Sri Rahayu, Hikmah, dan Robi Cahyadi, bahwa pajak industri pariwisata memiliki pengaruh paling signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pajak sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan.

---

<sup>99</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112.

## 2. Pengaruh Retribusi Sektor Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya bersumber dari retribusi pariwisata yang ada di suatu daerah. Apabila semakin meningkat penerimaan retribusi maka semakin meningkat juga Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan dan pengembangan dari objek wisata mempunyai peran penting dalam menambah jumlah penerimaan retribusi sektor pariwisata, *charge/tax administration* yang dilakukan pada pemungutan retribusi objek wisata juga diharapkan diterapkan secara efektif dan efisien, serta rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab wisatawan dalam membayar retribusi juga harus ditanggulangi.

Hal ini dapat terjadi pada suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan sektor pariwisata. Maka hal ini dapat membuat penerimaan menurun dan tidak memberikan pengaruh pada penerimaan sektor pariwisata. Dan penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Karisma, bahwa retribusi sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Maka hipotesis penelitian ini adalah :

H2 : Retribusi sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan.

### 3. Pajak dan retribusi sektor pariwisata di tinjau dari persepektif Ekonomi Islam

Dalam ranah Ekonomi Islam pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata dilihat dari sisi manfaat, sehingga pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata ini dalam Islam diperbolehkan. Diperbolehkannya memungut pajak dan retribusi ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, pada saat dana pemerintah yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, yang jika tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, dan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang diemban yang harus dipenuhi oleh ulil amri, pemungutan pajak dan retribusi yang dilaksanakan ini dengan sistem perpajakan yang adil dan yang selaras dengan spirit islam.

H3 : Pemungutan pajak dan retribusi dalam Ekonomi Islam diperbolehkan dengan melihat sisi manfaat yang di dapat serta dilaksanakan dengan sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan spirit Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>100</sup> Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang diukur dalam skala numerik (angka).<sup>101</sup>

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator variabel

---

<sup>100</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 4

<sup>101</sup> Mudrajad Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h.145.

penelitian.<sup>102</sup> Pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah dari sektor pajak sektor pariwisata dan retribusi sektor pariwisata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) OKU Selatan serta data dari jurnal dan artikel yang berkaitan dengan data pendapatan asli daerah (PAD), pajak dan retribusi sektor pariwisata.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>103</sup> Dalam penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan ataupun perbandingan dengan variabel lain.<sup>104</sup> Dalam penelitian ini pajak sektor pariwisata dan retribusi sektor pariwisata merupakan variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

<sup>102</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara.2008),h.5

<sup>103</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 8

<sup>104</sup> V.Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss.2015), h. 16

## B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.<sup>105</sup> Data sekunder berasal dari eksternal dan internal. Dalam hal ini data sekunder yang bersifat internal di dapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata dan kebudayaan (DISPARBUD), dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) OKU Selatan, data yang bersifat eksternal di dapat melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan, OKU Selatan dalam angka, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan Al-Hadits dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sektor pariwisata.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>106</sup> Metode ini dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung

---

<sup>105</sup> Sugiyono, *Op. Cit*

<sup>106</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia,2010), h. 52.

penelitian, seperti total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan dari tahun 2006-2017, Pajak daerah sektor pariwisata dan retribusi daerah sektor pariwisata, dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) OKU Selatan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU Selatan .

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>107</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data laporan realisasi PAD Kabupaten OKU Selatan dan pajak serta retribusi daerah sektor pariwisata pertahun selama Kabupaten OKU Selatan berdiri yang telah dipublikasikan oleh BPS OKU Selatan yang diambil 12 tahun terakhir yaitu tahun 2006-2017.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian<sup>108</sup>. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel dua belas (12) tahun terakhir yaitu tahun 2006-2017. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah

---

<sup>107</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, ( Bandung : Alfabeta, 2016), h. 117

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 120

*Sampling jenuh. Sampling jenuh* adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>109</sup> Sampel dari penelitian ini adalah semua realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2006-2017 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten OKU Selatan.

### E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti..

#### 1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak dan retribusi sektor pariwisata. Variabel bebas dari penelitian ini adalah pajak dan retribusi sektor pariwisata.

- a) Pajak sektor pariwisata (X1) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan kegiatan wisata dan berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari dari pajak hotel, restoran, pajak hiburan

---

<sup>109</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2016), h. 85.

yang dikenakan secara musiman saja dimana pariwisata merupakan sumber penerimaan penting tetapi tidak di berlakukan sepanjang tahun.<sup>110</sup> Dengan indikator penelitian sebagai berikut:

- 1) Jumlah penerimaan pajak hotel
- 2) Jumlah penerimaan pajak restoran
- 3) Jumlah penerimaan pajak hiburan
- 4) Pemungutan pajak merupakan amanah, pajak dibelanjakan secara jujur dan efisiensi, pajak di distribusikan secara merata untuk kemaslahatan masyarakat<sup>111</sup>

b) Retribusi sektor pariwisata (X2) merupakan retribusi yang bersumber dari penerimaan atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang berasal dari retribusi rekreasi dan olah raga, retribusi parkir, dan pendapatan retribusi lain-lain yang berasal dari objek wisata .<sup>112</sup>

Dengan indikator penelitian sebagai berikut:

- 1) Jumlah retribusi rekreasi dan olah raga
- 2) Jumlah retribusi tempat parkir
- 3) Jumlah pendapatan retribusi lain-lain yang berasal dari objek wisata

---

<sup>110</sup> Sugiono, *Log.Cit.*

<sup>111</sup> Abdul Halim, *Log.Cit.*

<sup>112</sup> Cahyadi, *Log.Cit.*

- 4) Pemungutan retribusi sebagai bentuk istihlaf, interpretasi langsung atas sesuatu yang telah dinikmati, pengembangan objek wisata berkelanjutan dan berkesinambungan.<sup>113</sup>

## 2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan asli daerah .<sup>114</sup> Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber asli daerah yaitu pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. (Abdul Halim 2012).<sup>115</sup> Dengan indikator penelitian jumlah pajak daerah dan jumlah retribusi daerah.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna

---

<sup>113</sup> Abdul Halim, *Log.Cit.*

<sup>114</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Bandung, 2007), h. 40.

<sup>115</sup> Abdul Halim, *Log.Cit.*

mendapatkan hasil yang terbaik.<sup>116</sup> Tujuan dari asumsi klasik ini agar variabel bebas tidak sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias.

### 1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi, maka suatu data perlu dilakukan pengujian yaitu sebagai berikut :

#### a) Normalitas

Uji normalitas dilakukan, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.<sup>117</sup> Metode uji normalitas yang digunakan adalah *Jarque-Bera*. Uji *Jarque-Bera* mengukur perbedaan *skewness* dan kuortis data dibandingkan apabila datanya bersifat normal.

#### b) Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.<sup>118</sup> Pendeteksian terhadap multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*) dari hasil regresi. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang

---

<sup>116</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009) , h. 95

<sup>117</sup>*Ibid*, h. 147

<sup>118</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* ( Edisi Kelima) (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011) , h. 95

dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila  $VIF > 10$  maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas yang serius.

c) Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya  $(t-1)$ .<sup>119</sup> Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat digunakan *correlation LM test* dengan melihat nilai prob. Dari  $F$  hitung dan *Chi-Square* hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

d) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain.<sup>120</sup> Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>121</sup> Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji

---

<sup>119</sup> *Ibid.* h. 99

<sup>120</sup> *Ibid.* h.125

<sup>121</sup> *Ibid.* h. 125

*white*. Uji *white* dilakukan dengan ketentuan nilai prob. Dari F hitung dan *Chi-Square* hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

## 2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan teknik analisis untuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis regresi bertujuan yang mempelajari “pengaruh” variabel bebas (*predictor*) terhadap variabel terikat (*criterion*).<sup>122</sup> Adapun persamaannya adalah:<sup>123</sup>

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi.

X1 = Pajak Sektor Pariwisata Kabupaten OKU Selatan.

X2= Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten OKU Selatan.

---

<sup>122</sup> D.r Kadir, M.Pd, *Statistika Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program Spss/Lisrel Dalam Penelitian)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 175

<sup>123</sup> Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.247.

### 3. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.

Pengambilan kesimpulannya dengan ketentuan:

- a) Jika nilai  $\text{sig} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- b) Jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima<sup>124</sup>

### 4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan keputusannya dengan ketentuan:<sup>125</sup>

- a) Jika nilai  $\text{sig} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak.
- b) Jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima.

### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.<sup>126</sup> Nilai  $R^2$  yang kecil

---

<sup>124</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi ke 2, (Bandung : Raja Grafindo persada, 2010), h. 27

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>126</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* ( (Edisi Kelima) (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011) , h. 87.

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.<sup>127</sup>



---

<sup>127</sup> Ibid, h. 87



- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri atas 19 Kecamatan, 252 Desa. Dengan nama-nama kecamatan adalah: Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau, dan Kecamatan Sungai Are.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Profil OKU Selatan Dalam Angka 2017

## 2. Gambaran Profil Objek Wisata OKU Selatan

Objek wisata OKU Selatan terdiri dari objek wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Tempat objek wisata Kabupaten OKU Selatan yang bisa dikunjungi tersedia diberbagai kecamatan di Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kec. Mekakau Ilir terdiri dari Air Terjun dan Kepadang, Air Batu Betangkup, Air Panas, Batu Peti, Batu Bejajar dan Batu Tapak Puyang.
- b. Kec. Banding Agung terdiri dari Danau Ranau, Makam Si Pahit Lidah, Batu Tapal, Lesung, Kursi dan Bersusun, dan Lamban Tuha.
- c. Kec. Warkuk Ranau Selatan terdiri dari Pemandian Air Panas, Gunung Seminung, Air Terjun Tanjung Jati, Pemandangan Tanjung, Pulau Marisa, Sawah Bertingkat, Balai Benih Ikan, Sumber Mata Air Jernih, Air Terjun Kembar, Bukit Bersemi, Perkebunan Kopi dan Sub Pusat Pelatihan Gajah.
- d. Kec. BPR Ranau Tengah terdiri dari Air Terjun Subik Tuha, Manduriang, Lamban Tuha, Batu Kebayan dan Mega, Villa Pusri, Bukit Batu Bara dan Candi Jepara.
- e. Kec. Buay Pemaca terdiri dari Bukit Batu Bara, Air Terjun Seruman, Danau Kuning, Sub Pelatihan Gajah, dan Jembatan Gantung.
- f. Kec. Simpang terdiri dari Danau Asmara, Air Terjun Papan dan Goa Kelambit.

- g. Kec. Muaradua terdiri dari Makam Puyang Komerling, Puyang Mambang Sakti, Puyang Minang Balak Seribu, Puyang Putri, Puyang H. Abdullah, Puyang Empu Serawan, Puyang Sekuntai Gunung Atung, Lubuk Kolam, Air Terjun Muara Kepayang, Lengkuh/Tujuh Kenangan dan Rejab, Batu Badak, Goa Serawo, Curup Datar.
- h. Kec. Buana Pemaca terdiri dari Danau Kasmaran dan Kereta Kencan.
- i. Kec. Buay Rawan terdiri dari Danau Halim, Lubuk Kolam, Air Terjun Iumai, dan Makam Pahlawan.
- j. Kec. Buay Sandang Aji terdiri dari Batu Beras Pasir, Perahu Telungkup dan Ciuman, Goa Asmara, Makam Puyang, Puyang Putri, Serunting Sakti, Air Terjun Pius, Hurangan, Sekupui.
- k. Kec. Tiga Dihaji terdiri dari Air Terjun Kebayan I, Sumur Putri dan Kuning, Tebat Balak, Batu Lesung, Situs Tapak, Pengaringan, Benteng Perang Pauh, Makam Puyang Naga, dan Jembatan Gantung.
- l. Kec. Buay Runjung terdiri dari Balai Benih Ikan, Kolam Air Deras dan Goa Saga Walet.
- m. Kec. Runjung Agung terdiri dari Air Terjun Papan.
- n. Kec. Kisam Tinggi terdiri dari Makam Puyang Balai, Puyang Raje, Senjata Pusaka Skin, Benteng Tinggi, Air Terjun Curup Embun; dan Tebat Bungkok.

- o. Kec. Muaradua Kisam terdiri dari Air Panas Gemuhak, Air Terjun Tanjung, Melki, Saka Kiri, Patung Main Sindi dan Gajah dan Lesung Batu.
- p. Kec. Kisam Ilir terdiri dari Air Terjun Campang, Keban, Batu Jung, Meriam, dan Tapak Seribu dan Lesung.
- q. Kec. Pulau Beringin terdiri dari Makam Puyang, Air Muncar, Air Terjun 100 Meter, rumah 10 Panggung, dan 7 Papan, Piano Tue, Almari Tue, Rumah Adat Suku, dan Air Panas Gemuhak.
- r. Kec. Sindang Danau terdiri dari Ayik Jehijih, Danau Rakihan, Air Terjun La'ai, Mata Air Kucing, Sumber Air Jernih, Makam Puyang Air, Puyang Rakse.
- s. Kec. Sungai Are terdiri dari Tambang Emas.

Data objek wisata yang didapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) OKU Selatan, bahwa jumlah objek wisata OKU Selatan ini berjumlah 112 destinasi wisata yang dapat dikunjungi.

### **3. Gambaran Sarana dan Prasarana OKU Selatan**

#### **a. Transportasi**

Laporan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten OKU Selatan melalui profil OKU Selatan dalam angka menggambarkan bahwa Kabupaten OKU Selatan adalah kawasan yang tidak berbatasan dengan laut, sehingga jalur darat menjadi sangat penting. Jalur transportasi ke Kabupaten OKU Selatan (Muaradua) dapat di

tempuh melalui udara yang berada di Kota Palembang dan Bandar Lampung dengan menggunakan berbagai maskapai penerbangan domestik, dilanjutkan dengan transportasi darat dari Palembang ke Kabupaten OKU Selatan. Akses menuju Kabupaten OKU Selatan (Muaradua) sangat mudah untuk di jangkau melalui jalur darat, dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) hanya membutuhkan waktu  $\pm$  6 jam perjalanan (+ 265 Km).

Jarak paling jauh dari ibu kota Kabupaten OKU Selatan (Muaradua) ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten ini adalah ke Kecamatan Sungai Are, sedangkan kecamatan yang paling dekat dengan Kota Muaradua adalah Kecamatan Buay Rawan. Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten ini adalah 1.113,27 Km (229,76 Km jalan Provinsi dan 702,51 Km jalan Kabupaten serta 181 Km jalan desa) dengan 2.290 m panjang jembatan. Di Kabupaten ini terdapat Terminal Induk Muaradua seluas + 11.145 m<sup>2</sup> dan Lapangan Terbang Perintis yang berlokasi di Kecamatan Banding Agung yang melayani rute Palembang-Banding Agung pp, dengan pesawat jenis CASA 212. Sayangnya bandara ini sudah tidak digunakan lagi saat ini.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Laporan OKU Selatan Dalam Angka Tahun 2017.

## b. Hotel, Restoran, dan Sarana Pendukung Pariwisata

Laporan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten OKU Selatan dalam profilnya tentang penyediaan sarana dan prasarana Kabupaten OKU Selatan, Dalam upaya mendukung Sektor Pariwisata, di wilayah ini terdapat 18 hotel/penginapan yang cukup representatif, yaitu: Cottage Ranau, Hotel Samudera, hotel Nendra Puri, hotel Seminung Permai, hotel Nico, Jasuma, Basuma, Wisma Widyaloka, Tanjung Raya, Mess Serasan Seandanan, hotel Seminung Permai, Mess PU Bina Marga, Losmen Permata, Losmen Batu Mega, Wisma PT. PUSRI, Graha Subik, Cottage PUSRI dan hotel Pantai Baru.

Di samping itu juga memiliki 18 Pondok Wisata (*homestay*) kelas A dengan jumlah kamar 69 unit, 12 pondok wisata kelas B dengan 37 kamar dan 14 pondok wisata kelas C dengan 44 kamar. Di wilayah ini dapat dengan mudah ditemukan 25 restoran/rumah makan/warung dengan 130 meja dan 415 kursi, 12 perusahaan bus umum dengan 124 unit bus, 5 perusahaan penyewaan kendaraan, dan 1 SPA (Srikandi SPA) yang terletak di depan terminal bis Muaradua.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Laporan Profil BPPRD Kabupaten OKU Selatan.

## B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pajak sektor pariwisata dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten OKU Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini data *time series* atau rentang waktu mulai dari 2006 sampai 2017. Alat olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*Eviews*) komputer dengan metode analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu perlu di lihat bagaimana perkembangan secara umum dari pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Total pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2006 sampai tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan  
Tahun 2006-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kakayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Lain –Lain Yang Sah	Total PAD	% Pertumbu- han
2006	782.112.503	701.915.483	4.800.000	500.000.000	5.611.247.447	-
2007	1.130.228.054	672.536.074	328.668.881	11.807.630.337	13.939.063.346	148%
2008	870.433.566	677.690.235,50	108.961.354,32	6.701.253.839,61	16.192.241.095	16%
2009	2.190.131.507,70	1.073.374.220	1.523.976.708,84	5.454.589.579,92	10.242.072.016,46	-37%
2010	2.628.711.277	876.315.000	1.874.813.329,55	7.707.545.064,66	13.087.384.671,21	28%
2011	2.532.932.129,91	963.720.386,50	2.717.908.792,10	7.462.379.230,61	13.676.922.539,12	5%
2012	3.648.515.441	1.845.723.264,92	3.227.505.790,14	10.226.806.354,56	18.948.549.580,62	39%
2013	5.830.286.035,75	6.469.732.495,79	1.808.341.892,01	8.797.216.822,19	22.896.577.245,74	21%
2014	5.411.353.280,79	8.020.595.291,75	212.811.590,31	19.671.018.451,12	33.315.778.613,97	46%
2015	11.081.088.474,90	3.565.424.263,80	2.913.253.666,86	20.725.003.106,19	38.248.769.511,75	15%
2016	5.180.010.000	10.577.700.000	1.650.000.000	24.675.000.000	42.082.710.000	10%
2017	5.736.508.399	7.851.000.000	3.429.985.483,12	15.321.797.546,75	32.339.291.429	-23%

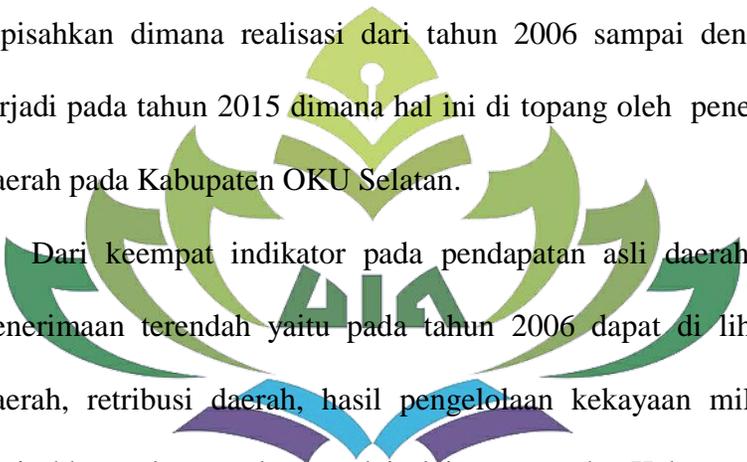
Sumber data diolah dari BPPRD OKU Selatan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Dari keempat subsektor yang menjadi indikator dalam pendapatan asli daerah (PAD), pajak dan retribusi menjadi paling dominan yang memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1, dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 mencapai penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp11.081.088.474,90 atau mengalami pertumbuhan sebesar 104,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh penambahan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang pada saat itu juga mengalami peningkatan persentase yaitu sebesar 110,5% dari tahun sebelumnya selain itu juga pajak parkir Kabupaten OKU Selatan 67,25% peningkatan kedua hal tersebut sangat mempengaruhi pada peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya.

Namun berbeda halnya dengan retribusi daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2017 penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mengalami kenaikan sebesar 195,67% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD),

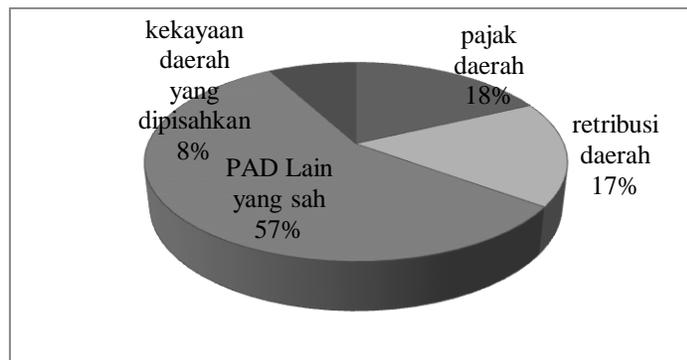
realisasi kontribusi penerimaan daerah yang dipisahkan terjadi pada tahun 2017 dimana pada tahun 2017 ini bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) mengalami peningkatan sebelumnya, pada tahun 2017 sendiri pendapatan asli daerah (PAD) OKU Selatan sangat di dukung oleh dana bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD). Selain itu pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan memiliki indikator yaitu penerimaan pendapatan lain-lain yang dipisahkan dimana realisasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 terjadi pada tahun 2015 dimana hal ini di topang oleh penerimaan jasa giro daerah pada Kabupaten OKU Selatan.



Dari keempat indikator pada pendapatan asli daerah (PAD) di atas penerimaan terendah yaitu pada tahun 2006 dapat di lihat bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan data masih sangat lemah atau kecil, hal ini dikarenakan belum banyaknya atau berjalannya sistem secara sempurna pada kabupaten ini, karena pada tahun 2006 Kabupaten OKU Selatan masih terbilang baru pada tahun 2003 baru mengalami otonomi daerah menjadi kabupaten baru dan belum banyaknya pembangunan yang berjalan pada kabupaten ini.

Pendapatan asli daerah di topang dan di dominasi oleh penerimaan yang menjadi indikator pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah akan dapat

membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun pada Kabupaten OKU Selatan ini pendapatan asli daerah (PAD) bukan ditopang oleh penerimaan pajak dan retribusi melainkan dari penerimaan nonpajak, hal ini dapat di lihat dari gambar 4 di bawah ini :



Gambar 4  
Persentase Rata-Rata Kontribusi Indikator pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2006-2017

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa bahwa pendapatan asli daerah (PAD) OKU Selatan di dominasi oleh pendapatan lain yang sah sebesar 57% dan pajak daerah sebesar 18% serta penerimaan retribusi daerah sebesar 17% dan 8% adalah pendapatan lain-lain yang dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa rata-rata kontribusi pajak dan retribusi OKU Selatan secara data masih sangat lemah bila dibandingkan dengan Pendapatan lain yang sah yang mencapai 57%, padahal pajak dan retribusi secara teori merupakan penyumbang yang mendominasi dalam peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).

## 2) Pajak Sektor Pariwisata

Pajak sektor pariwisata merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan kegiatan wisata, diantaranya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2  
Total Realisasi Pajak Sektor Pariwisata OKU Selatan  
Tahun Anggaran 2006-2017

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan
2006	R13.201.300	15.193.750	1.515.000	29.910.050	-
2007	13.371.000	14.235.750	1.730.000	29.675.750	-1%
2008	20.205.000	21.411.500	2.310.000	43.926.500	48%
2009	26.447.000	41.619.500	2.392.000	70.458.500	60%
2010	27.000.000	51.992.000	4.010.000	83.002.000	18%
2011	47.121.500	96.653.000	4.815.000	148.589.500	79%
2012	138.310.201	476.621.385	5.040.000	619.964.187	317%
2013	117.677.282	626.621.385	2.100.000	746.398.667	20%
2014	121.019.097	816.340.515	12.440.000	949.799.612	27%
2015	117.333.012	565.377.683	12.806.400	695.517.095	-27%
2016	83.321.000	850.440.907	8.682.674	923.750.620	33%
2017	90.839.100	929.045.422	9.489.822	1.029.373.744	11%

Sumber : Data Diolah BPPRD Dan Disparbud OKU Selatan Tahun 2018

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat realisasi total penerimaan pajak sektor pariwisata setiap tahun mengalami peningkatan hal ini karena adanya peningkatan penerimaan pada subsektor yang mendukung meningkatnya penerimaan pada pajak sektor pariwisata tersebut. Pemungutan pajak itu sendiri mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber keuangan bagi daerah tersebut. Selanjutnya kita ketahui bahwa pajak sektor pariwisata

merupakan pajak yang dipungut atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan wisata

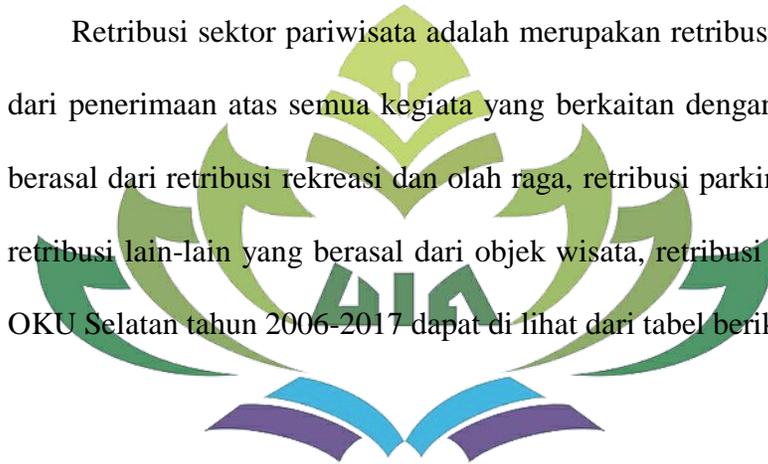
Penerimaan pajak sektor pariwisata OKU Selatan berdasarkan tabel 2 di dominasi oleh pajak restoran dari tahun ketahun penerimaan pajak mengalami peningkatan hal ini disebabkan bahwa dari tahun berkembangnya usaha masyarakat sebagai wujud dari bentuk pembangunan sarana dan prasarana OKU Selatan yang berlangsung setiap tahun, yang memberikan hasil positif dan peningkatan pada pajak sektor restoran ini.

Pada pajak hotel penerimaan terbesar di capai pada tahun 2012 yaitu Rp138.310.210 dari tahun sebelum-sebelumnya dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya. Naik turunnya penerimaan pajak hotel di OKU Selatan ini ditentukan oleh faktor yang menyebabkan yaitu sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat, hal ini yang menyebabkan tersendatnya penerimaan pajak yang berasal dari daerahnya sendiri dalam menggali potensi daerah tersebut. Selain itu kemampuan pemungutan administrasi pajak hotel yang masih rendah, hal ini disebabkan karena adanya biaya tambahan-tambahan lain yang dikenakan dalam pemungutan pajak hotel. Pada Kabupaten OKU Selatan terjadi penurunan yang signifikan pada penerimaan hotel hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah hunian hotel, tingkat hunian hotel di Kabupaten OKU Selatan ini hanya mencapai 1,22% dan 1,62%. Selain itu jumlah pengunjung lokal

lebih banyak sehingga pengunjung tidak perlu melakukan penginapan pada hotel, jumlah hotel juga ada yang tidak berfungsi atau beroperasi. Di Kabupaten OKU Selatan sebelumnya terdiri dari 21 jumlah hotel yang beroperasi dan sejak 2016 hanya 18 hotel yang beroperasi. Selain itu rendahnya pajak hotel ini disebabkan oleh kemampuan dan pelayanan pemungutan administrasi pajak yang masih rendah.

### 3) Retribusi Sektor Pariwisata

Retribusi sektor pariwisata adalah merupakan retribusi yang bersumber dari penerimaan atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang berasal dari retribusi rekreasi dan olah raga, retribusi parkir, dan pendapatan retribusi lain-lain yang berasal dari objek wisata, retribusi sektor pariwisata OKU Selatan tahun 2006-2017 dapat di lihat dari tabel berikut:



Tabel 3  
Realisasi Retribusi Sektor Pariwisata OKU Selatan  
Tahun Anggaran 2006-2017

Tahun	Rekreasi dan Olahraga	Khusus Parkir	Penginapan	Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan
2006	15.696.760	-	-	15.696.760	-
2007	10.875.174	8.875.174	15.990.955	35.741.303	128 %
2008	8.469.130	7.249.450	22.750.550	38.469.130	8%
2009	5.500.000	23.719.000	45.942.000	75.161.000	95%
2010	9.809.000	20.500.000	50.000.000	80.309.000	7%
2011	3.150.000	60.150.000	30.000.000	93.300.000	16%
2012	1.800.000	60.300.000	39.800.000	101.900.000	9%
2013	1.800.000	62.500.000	42.000.000	106.300.000	9%
2014	1.500.000	89.000.000	41.000.000	131.500.000	4%
2015	4.100.000	84.700.000	17.500.000	106.300.000	24%
2016	-	39.298.908	54.945.550	94.244.458	-19%
2017	-	14.200.000	84.200.000	98.200.000	-11%

Sumber : data diolah BPPRD OKU Selatan 2018

Menurut Cahyadi, bahwa penerimaan retribusi sektor pariwisata berasal dari total penerimaan retribusi rekreasi dan olah raga, retribusi khusus parkir, retribusi penginapan, dapat diketahui dari data bahwa total penerimaan retribusi sektor pariwisata terbesar berasal dari penerimaan retribusi penginapan dan retribusi khusus parkir.

Berdasarkan tabel diatas diketahui total penerimaan retribusi sektor pariwisata di atas maka dari tahun 2006 sampai tahun 2017 retribusi sektor pariwisata terbesar di capai pada tahun 2012 sampai tahun 2015 hal ini sangat di dominasi oleh penerimaan retribusi khusus parkir dan retribusi penginapan, pada dua tahun terakhir retribusi mengalami

penurunan penerimaan kembali hal ini dapat di lihat dari hasil penerimaan total retribusi terakhir yaitu tahun 2017 hanya Rp98,2 juta.

Naik turunnya penerimaan retribusi sektor pariwisata ini selain dari pemungutan retribusi dan administrasi yang melemah juga disebabkan oleh berkurangnya besaran pengunjung objek wisata atau yang menggunakan fasilitas objek wisata. Dari tahun ketahun dapat diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi sektor pariwisata masih sangat lemah pada penerimaan retribusi rekreasi dan olahraga, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 retribusi rekreasi dan olahraga pada laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) tidak terealisasi, hal ini menjadi salah satu sebab turunnya penerimaan retribusi pada dua tahun terakhir. Turunnya penerimaan retribusi baik pada retribusi rekreasi, retribusi khusus parkir, dan retribusi villa atau penginapan banyak berkurangnya pengunjung, objek wisata belum banyak dikembangkan dan dikenakan biaya retribusi, fasilitas dan sarana wisata kurang optimal atau masih seadanya.

### **C. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan :

## 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

### a) Normalitas

Tabel 4  
Hasil Uji Normalitas Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata  
Terhadap PAD OKU Selatan

Sampel	Jarque-Bera	Probability	Simpulan
12	1,242436	0,537290	Data berdistribusi Normal

Sumber : *output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil *output eviews* pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil *Jarque-Bera* sebesar 1,242436 atau ( $< 2$ ) dan nilai yang *Probability* diperoleh sebesar 0,537290 atau ( $> 5\%$ ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal

### b) Multikolinearitas

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata  
Terhadap PAD OKU Selatan

Variabel	VIF	Simpulan
Pajak	3,125596	Tidak terjadi multikolinearitas
Retribusi	3,125596	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : *output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan tabel di atas dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*), *output eviews* menunjukkan bahwa variabel pajak dan retribusi memiliki nilai VIF 3,125596 lebih kecil dari 10, maka dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c) **Autokorelasi**

Tabel 6  
Hasil Uji Autokorelasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata  
Terhadap PAD OKU Selatan

Sampel	Variabel	Prob. Chi Square	Simpulan
12	X1, X2	0,8810	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : *output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil *output eviews* pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,8810 atau lebih dari 5 % ( > 5% ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

d) **Heteroskedastisitas**

Tabel 7  
Hasil Uji Heteroskedastisitas - *White* Pajak dan Retribusi Sektor  
Pariwisata Terhadap PAD OKU Selatan

Sampel	Variabel	Prob. Chi-Square	Simpulan
12	X1, X2	0,4510	Homokedastisitas

Sumber : *output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil *output eviews* pada tabel 7 di atas menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,4510 atau lebih dari 5 % ( > 5% ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah Heteroskedastisitas

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8  
Hasil Uji Regresi Linear berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien	T hitung	Sig.	Simpulan
C	-	14,21177	4,517995	0,0015	-
Pajak	Positif	0,346356	3,175665	0,0113	Di terima
Retribusi	Positif	0,151299	0,589735	0,5699	Di tolak
<i>Adjusted R-squared</i>		= 0,785419			
<i>F-statistic</i>		= 21,13134			
Signifikansi		= 0,000398			

Sumber : *output eviws 9 data di olah 2018*

Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel pajak dan retribusi sektor pariwisata ini adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = 14,21 + 0,346 * X_1 + 0,151 * X_2$$

Dimana :

$$a = \text{Konstanta } 14,21 \quad b_1 = 0,346$$

$$X_1 = \text{Pajak} \quad b_2 = 0,151$$

$$X_2 = \text{Retribusi}$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 14,21 menyatakan bahwa jika pajak dan retribusi sektor pariwisata dianggap konstan atau sama dengan 0 maka besarnya pendapatan asli daerah (PAD) adalah 14,21%.

b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pajak sektor pariwisata sebesar 0,346, artinya jika pajak sektor pariwisata mengalami kenaikan 1 %, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,346%. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara pajak sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD), maka apabila nilai pajak sektor meningkat maka nilai pendapatan asli daerah juga meningkat.

c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi untuk retribusi pariwisata sebesar 0,151, artinya jika retribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,151%, dan Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara retribusi sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD), maka apabila nilai retribusi meningkat maka nilai pendapatan asli daerah juga meningkat.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pajak sektor pariwisata, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 6 di atas. Sebelum di ketahui hasil uji hipotesis yang

di terima atau di tolak, untuk itu ditentukan  $T_{tabel}$  dengan signifikansi 5%. (0,05) dengan uji satu arah dan derajat keabsahan  $df=n-k-1$  atau  $12-2-1=9$  diperoleh  $T_{tabel}$  sebesar 1,8331. Hasil uji secara parsial untuk pajak dan retribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 9  
Hasil Uji T Untuk Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Prediksi	Koefisien	T hitung	Sig.	Simpulan
Pajak	Positif	0,346356	3,175665	0,0113	Diterima
Retribusi	Positif	0,151299	0,589735	0,5699	Ditolak

*Sumber : output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji T) pada Variabel pajak sektor pariwisata menghasilkan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,175665 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 1,8331, yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,0113 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  diterima yang berarti pajak sektor pariwisata ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah ( $Y$ ) selama periode 2006-2017.

Variabel retribusi sektor pariwisata dimana hasil output eviews menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar 0,589735 dan pada  $T_{tabel}$  diperoleh nilai sebesar 1,8331 yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,5699 atau lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat dijelaskan bahwa retribusi sektor pariwisata ( $X_2$ ) tidak

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hasil penelitian bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara variabel retribusi sektor pariwisata dengan pendapatan asli daerah (PAD). Jika semakin besar retribusi sektor pariwisata OKU Selatan maka semakin meningkat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan. Sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan retribusi sektor pariwisata maka pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan mengalami penurunan.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (pajak dan retribusi sektor pariwisata) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel terikat. Sebelum diketahui hasil uji hipotesis yang diterima atau ditolak, untuk itu ditentukan  $F_{tabel}$  dengan signifikansi 5%. (0,05) dengan uji satu arah dan derajat kebebasan  $df=(k, n-k)$  F (2, 10) atau diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 4,10.

Tabel 12  
Hasil Uji F Untuk Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

<i>Adjusted R-squared</i>	<i>F-statistic</i>	Sig.	Kesimpulan
0,785419	21,13134	0,000398	Diterima

Sumber : *output eviews 9 data di olah 2018*

Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk  $F_{hitung}$  sebesar 21,13134 dan diketahui  $F_{tabel}$  sebesar 4,10 yang berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000398 atau kurang dari 0,05 (5%) maka hal ini menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima yang berarti pajak sektor pariwisata dan retribusi sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten OKU Selatan pada periode 2006 sampai dengan tahun 2017.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menunjukkan variabel dependen terbatas. Artinya uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Berdasarkan *output eviws* menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,785419 atau 78,54%. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas adalah sebesar 78,54%, sehingga dapat diartikan bahwa pajak dan retribusi sektor pariwisata mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 78,54%. sisanya sebesar 21,46 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

## D. Pembahasan

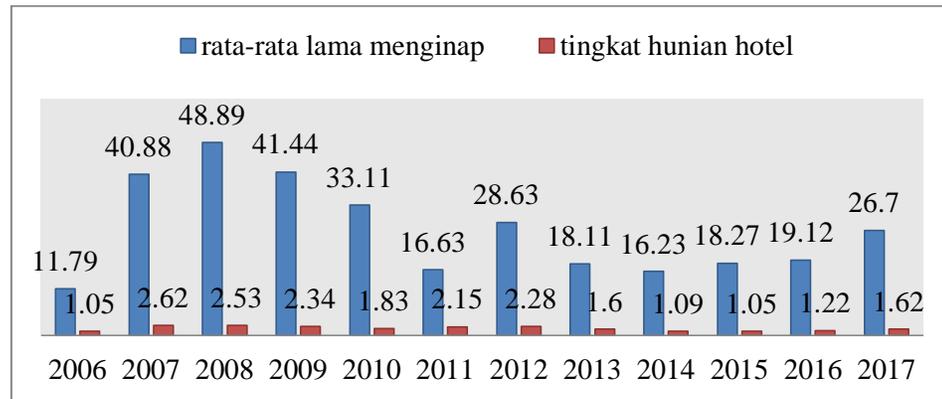
### 1. Pengaruh Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Oku Selatan Pada Tahun 2006-2017

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda menggunakan uji parsial (Uji T) diperoleh hasil  $T_{hitung}$  dari pajak sektor pariwisata menghasilkan nilai sebesar 3,175665 dan diketahui bahwa nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,8331, yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,0113 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak sektor pariwisata (X1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) selama periode 2006-2017.

Pada realisasi data yang diperoleh dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 realisasi mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sektor pariwisata yang berasal dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan seseorang, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah daerah, laju wisatawan asing dan domestik, serta jumlah objek dan subjek objek wisata.

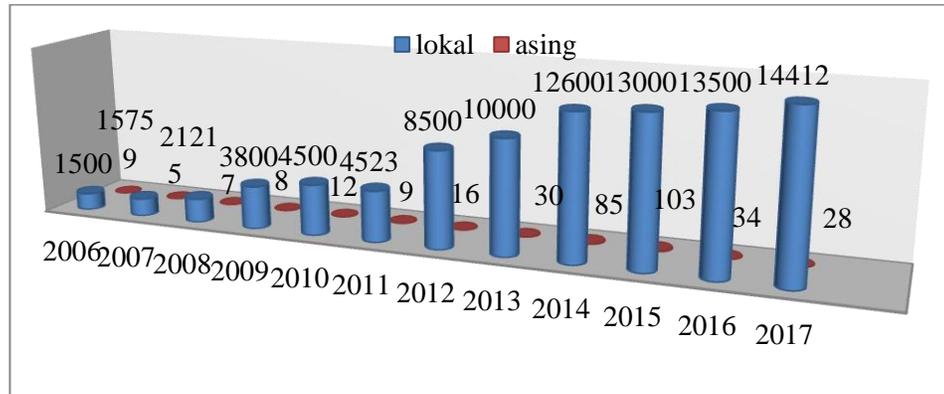
Pajak pariwisata dipengaruhi oleh total penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Besarnya penerimaan pajak hotel adalah diterima dari pembayaran atas tamu yang menginap, pada kamar yang di sewa. Sehingga secara spesifik tingkat hunian hotel akan mempengaruhi

pada penerimaan pajak. Pada Kabupaten OKU Selatan tingkat hunian hotel dapat di lihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5  
Rata-Rata Lama dan Tingkat Hunian Hotel OKU Selatan  
Tahun Anggaran 2006-2017

Pada pajak restoran subjeknya dapat di lihat dari konsumen restoran, sebagian besar konsumen restoran adalah masyarakat berpendapatan menengah keatas yang potensinya dapat di lihat dari pendapatan perkapita. Sedangkan pajak hiburan subjeknya dilihat dari jumlah penonton yang menonton (menikmati) hiburan). Salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata. Secara spesifik peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek wisata. Pada Kabupaten OKU Selatan jumlah pengunjung objek wisata sebagai berikut:



Gambar 6  
Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kabupaten OKU Selatan  
Tahun 2006-2017

Ketiga pajak di atas maka di dapat total pajak sektor pariwisata, dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti bahwa pajak sektor pariwisata secara parsial mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten OKU Selatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Wira Wati, penelitian dilakukan di provinsi Bali pada tahun 2013, yang mengatakan bahwa secara parsial penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Robi Cahyadi penelitian ini dilakukan Provinsi Riau pada tahun 2015, yang mengatakan bahwa pajak industri pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mentari dan Sri Rahayu, yang dilakukan pada tahun 2015, bahwa secara parsial pajak hotel berpengaruh

signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## **2. Pengaruh Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten OKU Selatan Pada Tahun 2006-2017**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda menggunakan uji parsial (Uji T) diperoleh hasil  $T_{hitung}$  untuk variabel retribusi sektor pariwisata sebesar 0,589735 dan diketahui  $T_{tabel}$  sebesar 1,8331 yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,5699 atau lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi sektor pariwisata ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ( $Y$ ).

Pada realisasi data yang diperoleh dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 realisasi mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya, sedangkan 3 tahun terakhir total penerimaan retribusi sektor pariwisata mengalami penurunan. Penerimaan sektor retribusi ini dipengaruhi oleh peningkatan pada penerimaan retribusi rekreasi dan olah raga, retribusi khusus parkir, dan retribusi penginapan/villa. yang sangat dipengaruhi oleh jumlah objek wisata, jumlah pengunjung, dan pendapatan perkapita.

Pada Kabupaten OKU Selatan dapat dilihat dari total atau jumlah objek wisata OKU Selatan sebanyak 112 (seratus dua belas) objek wisata

yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten OKU Selatan baik dari objek wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah dan wisata budaya yang ada di OKU Selatan. Kenaikan dan penurunan penerimaan retribusi pada sektor pariwisata disebabkan oleh jumlah objek wisata yang dikembangkan oleh Kabupaten OKU Selatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU Selatan sedang menggali dan mengoptimalkan pengembangan objek wisata OKU Selatan dengan menambah dan melengkapi wahana pada destinasi wisata OKU Selatan sehingga menarik untuk masyarakat berkunjung dan menikmati wahana pada objek wisata, selain itu pengembangan budaya juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten OKU Selatan sebagai bentuk pengembangan potensi OKU Selatan maka setiap tahun telah diadakan Festival seni dan budaya yang diadakan di salah satu destinasi wisata yaitu Danau Ranau.

Pengembangan dan pelaksanaan festival hal tersebut mengakibatkan jumlah pengunjung meningkat meski peningkatan hanya pada pengunjung lokal saja. Dari ketiga retribusi di atas maka di dapat total retribusi sektor pariwisata, dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti bahwa retribusi sektor pariwisata secara parsial retribusi tidak mempunyai yang signifikan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten OKU Selatan.

Secara teori hubungan antara pendapatan asli daerah dan retribusi sektor pariwisata di lihat secara hubungan fungsional, secara fungsioanal

karena retribusi merupakan fungsi dari pendapatan asli daerah (PAD). Di mana semakin meningkatnya retribusi akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan melalui penerimaan retribusi. Dalam penelitian ini berbeda dengan Kabupaten OKU Selatan yang menghasilkan bahwa retribusi sektor pariwisata tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Apriani penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasik Malaya pada tahun 2013, bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan secara parsial pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Tasik Malaya dan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh secara dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini disebabkan karena pada Kabupaten OKU Selatan destinasi objek wisata yang ada, dalam tahap perkembangan banyaknya wisata yang belum di eksplor oleh pemerintah baik dari wisata alam dan wisata budaya, pemungutan retribusi juga masih minim hal ini dibuktikan pada objek wisata danau rakihan, objek wisata ini belum dipungut biaya jika hendak mengunjungi destinasi wisata ini. Titik pusat objek wisata OKU Selatan terdapat di Danau Ranau. Banyaknya destinasi objek wisata di

OKU Selatan masih banyak yang belum dikenai biaya retribusi. Pada objek wisata air terjun dan wisata sejarah seperti makam-makam puyang.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh karisma, Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Wira Wati, penelitian dilakukan di provinsi Bali pada tahun 2013, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sili Antari di Kabupaten Gianyar pada tahun 2013, dan penelitian Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah pada Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa secara parsial retribusi objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

### **3. Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun 2006-2017 Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

Ditinjau dari sisi ekonomi islam pajak dan retribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari sisi manfaat dan kemudharatannya, pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata ini dalam islam diperbolehkan. Diperbolehkannya memungut pajak dan retribusi ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, pada saat dana pemerintah yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, yang jika tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, dan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang diemban yang harus dipenuhi oleh ulil amri, pemungutan pajak dan

retribusi yang dilaksanakan ini dengan sistem perpajakan yang adil dan yang selaras dengan spirit islam. Pemungutan pajak dan retribusi ini dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9) : 29) yaitu :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah (9):29)<sup>131</sup>

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan setiap hambanya untuk membayar jizyah, kata jizyah pada ayat diatas diterjemahkan sebagai pajak. Yang harus dibayar dengan patuh, hal ini berkaitan dengan pengoptimalan keuangan publik. Apabila masyarakat bertanggung jawab dan patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pemerintah yang didedikasikan guna pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan.<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Bandung :Diponegoro, 2014), h. 152

<sup>132</sup> Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 28.

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>133</sup> Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan /kekurangan baitul mal.

Pajak dan retribusi yang dipungut dari sektor pariwisata OKU Selatan ini terdiri dari pajak-pajak yang mempunyai kaitan dengan kegiatan wisata. Seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan juga retribusi yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Pajak hotel yang dipungut ini adalah pemungutan pajak yang dikenakan pada hotel-hotel berbasis syariah dan tidak menyalahi aturan Al-qur'an dan Al-hadits, tidak menerapkan kebebasan dalam segi penyajian pelayanan. Fasilitas kamar hotel pun diciftakan secara kondusif tidak ada bar, tempat dugem atau hingar bingar tempat hura-hura didalamnya.

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas objek yang disediakan oleh restoran. Dalam al-qur'an dijelaskan bahwa manusia harus mengonsumsi makan dan minuman yang halal dan toyyiban, hal ini berarti restoran yang baik adalah restoran yang menjual dan melakukan

---

<sup>133</sup> *Op.Cit*, Gusfahmi, h. 31.

penyediaan jasa makanan yang yang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang Al-qur'an dan Al-hadits, telah dijelaskan bahwa makanan yang disediakan tidak mengandung unsur haram dan makanan, minuman, yang disediakan pada restoran harus bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini tentu saja meliputi pemungutan pajak atas tempat-tempat hiburan, seperti tontonan film, pertunjukan kesenian, musik, seni, tari, kontes kecantikan dan sejenisnya. Namun ada juga tempat yang dilarang yang mengandung kemudharatan, seperti tempat-tempat diskotik, bar, klub malam dan sejenisnya hal ini bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Sama halnya dengan pemungutan pajak, retribusi merupakan suatu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada warganya. Dan hukumnya diperbolehkan selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Pada pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan didasarkan atas dasar kepercayaan antara pemilik kendaraan dengan pemilik lahan parkir, dengan adanya retribusi atau pembayaran parkir yang dilakukan maka pihak yang menyediakan jasa parkir mempunyai tanggung jawab dan amanah atas kendaraan yang telah dititipkan dilahan parkir tersebut. Tentu hal ini memberikan manfaat pada sipemilik kendaraan dengan ini kendaraan yang di miliki dan di parkirkan.

Retribusi villa atau penginapan hal ini dalam penerapannya atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam pemungutannya tidak diperbolehkan melakukan aksi kecurangan apapun, yang akan merugikan atau merusak citra dan nama baik, seperti imbal balik yang terlalu tinggi dikarenakan sipengunjung tidak mengetahui tarif yang ditentukan. Retribusi rekreasi dan olahraga dipungut pemerintah atas pelayanan tempat rekreasi atas pelayanan objek rekreasi dan pariwisata serta olahraga yang disediakan oleh pemerintah yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

Peningkatan pajak dan retribusi sektor pariwisata ini akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dengan memperhatikan dua aspek perubahan dan penetapan tarif baik pajak dan retribusi jika dilihat dari ajaran islam. Yang *pertama*, melihat perubahan penetapan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah dan yang *kedua* optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah wajib mendistribusikannya kembali pada masyarakat

Sebagai pengelola, pemerintah Kabupaten OKU Selatan harus mampu menyalurkan kembali penerimaan pajak dan retribusi yang dipungut pada sektor pariwisata tersebut melalui pembangunan daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat OKU Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan judul “Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kab. OKU Selatan Tahun 2006-2017)” adalah sebagai berikut :

1. Pajak sektor pariwisata merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna pembangunan ekonomi. Di Kabupaten OKU Selatan yaitu berdasarkan hasil uji penelitian dengan analisis regresi linear berganda, dapat dinyatakan bahwa pajak sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten OKU Selatan selama periode 2006-2017.
2. Hasil uji untuk variabel retribusi dinyatakan bahwa retribusi sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten OKU Selatan untuk periode 2006-2017. *Tax administration* yang dilakukan pada pemungutan retribusi objek wisata OKU Selatan belum efektif dan efisien, rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab wisatawan dalam membayar retribusi, dan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah belum di eksplor secara maksimal.

3. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pajak dan retribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari sisi manfaat dan kemudharatannya, pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata ini dalam Islam diperbolehkan. Pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata ini banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kabupaten OKU Selatan, Diperbolehkannya memungut pajak dan retribusi ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, pada saat dana pemerintah yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, yang jika tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, dan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang diemban yang harus dipenuhi oleh ulil amri, pemungutan pajak dan retribusi yang dilaksanakan ini dengan sistem perpajakan yang adil dan yang selaras dengan spirit islam. Pemungutan pajak dan retribusi ini dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9) : 29).

## **B. Saran**

Pokok pikiran yang dapat dijadikan saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

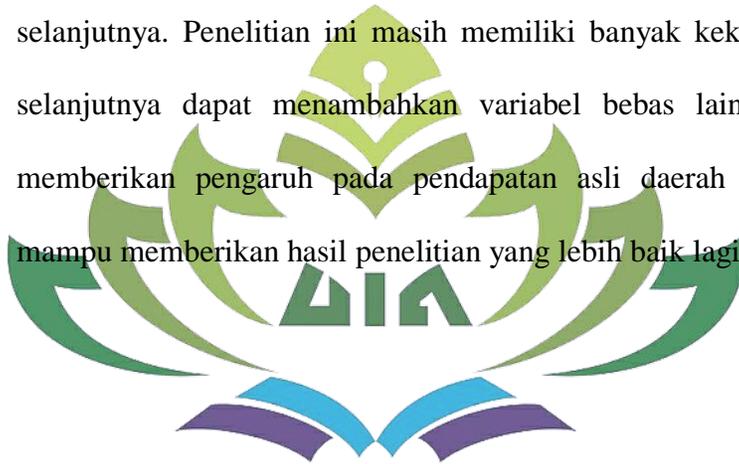
1. Bagi pemerintah daerah, khususnya BPPRD dan DISPARBUD OKU Selatan bahwa pemungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten OKU Selatan sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU

Selatan, dalam hal ini bukan berarti pengembangan potensi sektor pariwisata OKU Selatan berhenti disini saja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten OKU Selatan diantaranya : a). Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan retribusi, b). Pemerintah harus membangun lagi sarana dan prasarana yang menunjang pada objek wisata misalnya akses jalan, listrik dan air, terminal, jembatan, selain itu memperbaiki akses telekomunikasi seperti perlunya akses internet, jaringan telepon dan membangun sarana yang dapat mempermudah transaksi bagi wisatawan seperti Bank dan ATM. c). Pemerintah Kabupaten OKU Selatan harus melakukan promosi kepariwisataan yang berkesmambungan dan berkelanjutan misalnya melakukan promosi melalui media elektronik dan media sosial lainnya (*Instagram, Facebook, Youtoube, Twitter* dan lain-lain). d). Pemerintah Kabupaten OKU Selatan perlu tergabung dalam organisasi-organisasi kepariwisataan nasional Indonesia, dengan tergabungnya pemerintah ini akan dapat mengeksplor lebih luas lagi objek wisata yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

2. Bagi masyarakat harus berperan aktif dalam mengelola objek wisata agar menjadi tujuan destinasi yang menarik di Kabupaten OKU Selatan, dan para pemilik usaha diharapkan untuk meningkatkan pelayanan wisata yang baik agar wisatawan dapat merasa nyaman, hal ini dikarenakan

peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung akan mempengaruhi pendapatan pada sektor pariwisata Kabupaten OKU Selatan. Serta masyarakat harus dapat menjalankan tanggung jawab dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak dan retribusi, karena hal ini akan memberikan *feedback* kepada masyarakat dengan hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat memberikan pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, The Enactment And Legal Implication Of Tourism Tax Through The Water Resource Management For Increasing The Local Revenue: A Comparison Between Indonesia And Advanced Countries, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* Volume 8, Issue 9, September 2017, pp. 844–851, Article ID: IJCIET\_08\_09\_094 .
- Anggraeni, Dina. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.*(Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu). [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id) di akses 20 November 2017.
- Apriani, Evi “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2012” (online) tersedia di [journal.unsil.ac.id](http://journal.unsil.ac.id) di akses 27 februari 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Audi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, (Manado, 2013)
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011.
- Bambang Ibnu Marto, Abdul Hakim, Andy Fefta Wijaya, Ruth Nur Pratiwi judul The Performance of Revenue Office in the Perspective of New Public Management - (Study on Performance of Local Tax Management in Makassar, Indonesia) *International Journal of Applied accounting* 2015, vol.5, No. 1.
- . Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Depkeu RI, <http://www.pajakonline.com> diakses 23 November 2009.
- Dewi Mentari dan Sri Rahayu. *Penelitian Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, *jurnal e-Proceeding of Management* : Vol.2, No.2 Agustus 2015.
- Diaz, Priantara. *Perpajakan Indonesia, edisi ketiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Dina Anggraeni. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.*(Studi Empiris Pada

Provinsi Bengkulu). [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id) di akses 20 November 2017.

-----, *Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo, 2008.

Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Edward W. Memah, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado, *Jurnal EMBA* 873 Vol 1 No.3 Juni 2013.

Fajar Hadianto, Format Keuangan Publik yang islami, *Jurnal Ekonomi Islami*, Vol. IV, No.1, Juli (2010)

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Abd. Rachim A.F, Analyzing Local Revenue in Local Otonomy Implementation towards Self-Reliance of Samarinda Municipality, *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, Vol 6, No.6, 2015.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Hikmah, Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Of Government – JOG* (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 2 Nomor 2 Januari – Juni 2017.

Huda, Nurul dkk. *Keuangan Public Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Jakarta Kencana, 2012.

Husnaini, Usman dan Setiadi. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Inayah, Gazi, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, , Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Kadir. *Statistika Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program Spss/Lisrel Dalam Penelitian)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*. Edisi Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI. Tersedia di [www.disparbud.okus.id](http://www.disparbud.okus.id). Diakses 2 januari 2018.
- Kuncoro, Mudrajad Ph.D. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga, 2009.
- Mahardika, Indra. *Perpajakan : Edisi Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant, 2017.
- Mardiasmo. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2011.
- Md. Krisna Arta Anngar kusuma, Mi Gust Putu Wira wati , Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pad sekabupaten di provinsi bali, *E-Jurnal Akuntansi*, No. 5 Vol. 3 tahun 2013.
- Merpaung, Happy. *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung : Alfabeta, 2002.
- Muljadi & Andri Warman. *Kepariwisataaan dan Perjalanan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ni Ketut Sari Adnyani Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District) *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 4, Issue 2 (June, 2015) h, 2289-1552.
- Ni Luh Sili Antari, Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar, *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Agustus 2013, vol.3 No.1.
- Nur Indah Kurnia Sari, Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik)
- . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung. 2016.
- . Peraturan daerah No.2 Tahun 2013, Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa “online”tersedia di <http://denpasar.bpk.go.id>. di akses 16 februari 2018.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

----- . Profil oku selatan dalam angka tahun 2017. Tersedia di [www.bps Okus](http://www.bps Okus). Diakses 2 januari 2018.

----- . *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Qadim, Abdul. *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002.

Rahardjo, Adisasmita. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Randy J.R.Walakandou, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni 2013.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Riwu, Kaho josep. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Robbi, Cahyadi. Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009–2013, *Jom FEKON* No. 2 Vol. 2 Oktober 2015.

Robert Tua Siregar, dengan judul Penelitian The Influence Of Tourism Sector To The Income Of Simalungun Regency Area, *OSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) Volume 7, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), h. 06-11*.

Saidal arif, *Analisis Ekonomi Islam Tentang Pengembangan Objek Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam (Lampung, IAIN raden intan, 2015).

Saragih. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghallia Indonesia, 2003.

Sari, Diana *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata, 2013.

- Sasana, Hadi. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* Vol. 18 No.1. Maret 2011.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Siringoringo, Hotniar. *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2005.
- Sistem Pemungutan Pajak Parkir “On-Line” tersedia di <http://bprd..go.id/pajak-parkir/>(24 Februari 2018)
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sofia Dwi Yuliani, Et.Al, Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1, No. 1 2015.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Sucipto, Herry dan Fitria Andayani. *Wisata Syariah : Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media Dan Wisata Syariah Cobnsulting, 2014.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015.
- Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015, *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No. 2 Desember 2016.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI SOFFSET, 2005.
- Suryadana, M. Liga dan Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa, Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado, “online” tersedia <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 24 februari 2018.

----- Tim prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.

----- Undang- Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, tersedia di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) di akses 4 januari 2018.

----- *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

----- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat 7 pasl 1 ayat 26. Tersedia di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Diakses 4 januari 2018.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : salemba Empat, 2013),h. 6.

Widya, Karisma, *Analisis Peran Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo*, tersedia di <http://joernal.umsb.ac.id> di akses Februari 2018.

Wirwan, B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat,2004.

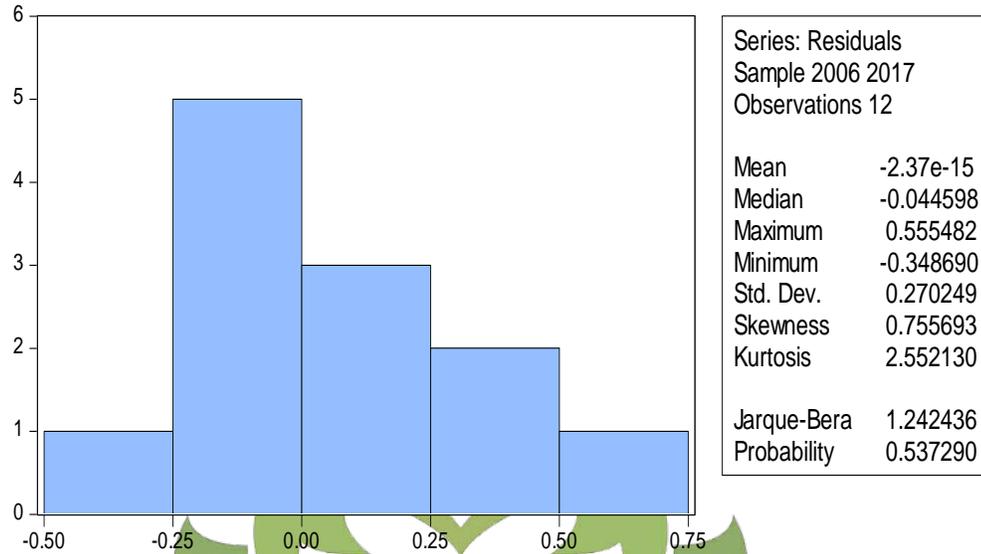
Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yulia Priskila Lumentah, Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado, *Jurnal Emba* 1049 Vol.1 No.3 September 2013.

Lampiran 6

**HASIL OUTPUT Uji ASUMSI KLASIK**

**1. NORMALITAS**



**2. MULTIKOLINEARITAS**

Variance Inflation Factors

Date: 04/10/18 Time: 01:50

Sample: 2006 2017

Included observations: 12

---

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.894753	1330.174	NA
X1	0.011895	591.8207	3.125596
X2	0.065820	2895.935	3.125596

---

### 3. AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.075505	Prob. F(2,7)	0.9280
Obs*R-squared	0.253407	Prob. Chi-Square(2)	0.8810

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/10/18 Time: 01:53

Sample: 2006 2017

Included observations: 12

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.282664	3.674909	-0.076917	0.9408
X1	-0.012306	0.126836	-0.097022	0.9254
X2	0.028508	0.301488	0.094557	0.9273
RESID(-1)	0.109200	0.392883	0.277946	0.7891
RESID(-2)	-0.122705	0.410239	-0.299105	0.7735
R-squared	0.021117	Mean dependent var		-2.65E-16
Adjusted R-squared	-0.538244	S.D. dependent var		0.270249
S.E. of regression	0.335179	Akaike info criterion		0.946031
Sum squared resid	0.786414	Schwarz criterion		1.148076
Log likelihood	-0.676189	Hannan-Quinn criter.		0.871227
F-statistic	0.037752	Durbin-Watson stat		1.913240
Prob(F-statistic)	0.996610			

### 4. HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: White

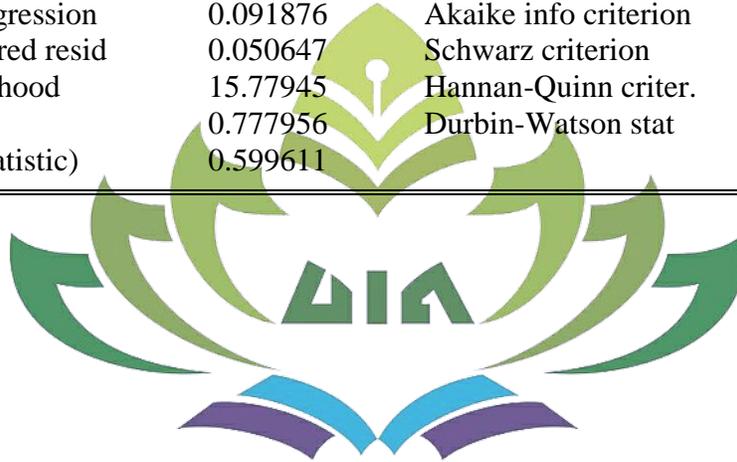
F-statistic	0.777956	Prob. F(5,6)	0.5996
Obs*R-squared	4.719758	Prob. Chi-Square(5)	0.4510
Scaled explained SS	2.060347	Prob. Chi-Square(5)	0.8407

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares  
 Date: 03/21/18 Time: 02:03  
 Sample: 2006 2017  
 Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.58890	43.47513	-0.496580	0.6372
X1	-3.239577	2.384333	-1.358693	0.2231
X1^2	-0.005790	0.084029	-0.068910	0.9473
X1*X2	0.190691	0.242678	0.785779	0.4619
X2	5.870500	5.268002	1.114369	0.3078
X2^2	-0.264221	0.255481	-1.034212	0.3409
R-squared	0.393313	Mean dependent var		0.066948
Adjusted R-squared	-0.112259	S.D. dependent var		0.087116
S.E. of regression	0.091876	Akaike info criterion		-1.629908
Sum squared resid	0.050647	Schwarz criterion		-1.387455
Log likelihood	15.77945	Hannan-Quinn criter.		-1.719673
F-statistic	0.777956	Durbin-Watson stat		2.544146
Prob(F-statistic)	0.599611			



Lampiran

**HASIL OUTPUT REGRESI LINEAR BERGANDA**

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 03/21/18 Time: 01:54  
Sample: 2006 2017  
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.21177	3.145593	4.517995	0.0015
X1	0.346356	0.109066	3.175665	0.0113
X2	0.151299	0.256554	0.589735	0.5699

R-squared	0.824434	Mean dependent var	23.59296
Adjusted R-squared	0.785419	S.D. dependent var	0.644976
S.E. of regression	0.298771	Akaike info criterion	0.634041
Sum squared resid	0.803379	Schwarz criterion	0.755268
Log likelihood	-0.804249	Hannan-Quinn criter.	0.589159
F-statistic	21.13134	Durbin-Watson stat	1.754733
Prob(F-statistic)	0.000398		

Estimation Command:

=====  
LS Y C X1 X2

Estimation Equation:

=====  
 $Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2$

Substituted Coefficients:

=====  
 $Y = 14.2117703297 + 0.346355918398*X1 + 0.151298939922*X2$



**LAPORAN**  
**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2006-2017**  
**dalam ribuan rupiah**

No	JENIS PUNGUTAN	2006	2007	2008	2009	2010
	Pendapatan Asli Daerah	Rp5.611.247.447	Rp13.939.063.346	Rp16.192.241.095	Rp10.242.072.016	Rp13.087.384.671
A	Jumlah Pajak Daerah	Rp782.112.503	Rp1.130.228.054	Rp870.433.566	Rp2.190.131.508	Rp2.628.711.277
1	Pajak Hotel	Rp13.201.300	Rp13.371.000	Rp20.205.000	Rp26.447.000	Rp27.000.000
2	Pajak Restoran	Rp15.193.750	Rp14.235.750	Rp21.411.500	Rp41.619.500	Rp51.992.000
3	Pajak Hiburan	Rp1.515.000	Rp1.730.000	Rp2.310.000	Rp2.392.000	Rp4.010.000
4	Pajak Reklame	Rp17.813.539	Rp14.916.000	Rp18.252.900	Rp12.897.950	Rp28.865.750
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp92.645.274	Rp224.887.966	Rp336.092.393	-	Rp849.530.678
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	-	-	-	Rp1.000.000	Rp1.667.312.849
7	Pajak Parker	-	-	-	-	-
8	Pajak Air bawah Tanah	-	-	-	-	-
9	Pajak Sarang Burung Wallow	Rp86.355.500	Rp54.000.000	Rp35.000.000	-	-
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	-	-	-	-	-
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Perkotaan	-	-	-	-	-
	Pajak Galian Gol C	Rp555.388.140	Rp806.748.338	Rp437.161.773	-	-
-	Galian Go C9/Pasir Batu (Sirtu)	-	-	Rp4.375.000	-	-
	Koral	-	-	Rp12.323.685	-	-
	Kerikil	-	-	Rp188.638.709	-	-
	Pasir	-	-	Rp51.026.388	-	-
	Pasir Urug	-	-	Rp4.579.304	-	-
	Tanah Urug	-	-	Rp49.597.002	-	-
	Batu Kali	-	-	Rp126.584.105	-	-
	Batu Bata	-	-	Rp37.580	-	-
B	Jumlah Retribusi Daerah	Rp701.915.483	Rp672.536.074	Rp677.690.236	Rp1.073.374.220	Rp876.315.000
	Total Ret. Jasa Umum				Rp750.092.500	Rp372.575.000
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	Rp40.926.900	Rp43.236.000	Rp151.808.000	-	-

2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan		Rp44.995.000	46,782,750,00	Rp76.624.500	Rp77.000.000
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	Rp142.886.000	Rp731.400	Rp94.452.500	Rp290.850.000	Rp148.740.000
4	Ret. Pengambilan Hasil Hutan Kayu / Non Kayu	Rp197.136.868	Rp1.961.666.269	Rp37.682.200	-	-
5	Akte Kelahiran	Rp36.830.000	Rp534.200	Rp46.392.500	Rp85.345.000	-
6	Kartu Keluarga		Rp534.200	Rp35.194.500	Rp178.925.500	
7	Ret. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rp34.800.000	Rp11.000.000	Rp18.375.000	Rp27.000.000	Rp33.180.000
8	Ret. Pelayanan Pasar	Rp121.244.900	96,902,900,30	Rp85.155.140	Rp69.942.500	Rp91.275.000
9	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor		Rp2.392.800	Rp14.040.000	Rp21.405.000	Rp22.380.000
	Ret. Perizinan Angkutan	Rp3.639.455	Rp1.486.453	-	-	-
10	Ret. Terminal Muaradua			Rp40.913.000	-	-
	Parker Khusus					
11	Ret. Izin Pendiri Koperasi/Badan Hukum Koperasi			Rp1.350.000	-	-
12	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta				-	-
13	Ret. Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus				-	-
14	Ret. Pengelolaan Limbah Cair				-	-
15	Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang				-	-
16	Ret. Pelayanan Pendidikan				-	-
17	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi				-	-
	Total Ret. Jasa Usaha	-	-	Rp1.864.000	Rp209.895.000	Rp241.100.000
18	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah				-	Rp112.000.000
19	Pembinaan Dan Pematangan Hewan Ternak		Rp3.775.000	Rp3.085.500	Rp2.300.000	-
20	Ret. Pemakaian Gedung Kesenian Muaradua				Rp72.000.000	-
-	Ret. Pemakaian Mess Oku Selatan Di Palembang				Rp30.000.000	-

-	Ret. Sewa Alar Berat	-	-	-	Rp1.000.000	-
21	Ret. Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-
22	Ret. Terminal	Rp2.525.000	Rp5.274.000	-	Rp44.249.000	Rp46.871.000
23	Ret. Tempat Khusus Parker	-	Rp31.160.000	-	Rp3.719.000	Rp300.000
24	Ret. Tempat Penginapan	-	-	-	Rp45.942.000	Rp50.000.000
25	Ret. Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-
26	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	Rp1.085.000	Rp1.920.000
27	Ret. Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Rp15.696.760	Rp10.875.174	-	Rp25.500.000	Rp30.009.000
28	Ret. Penyebrangan Di Air	-	-	-	-	-
	Total Ret.Perizinan Tertentu	-	-	-	Rp113.386.720	Rp262.640.000
30	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	-	Rp1.947.620	Rp60.697.078	Rp29.635.625	Rp89.314.000
31	Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-
32	Ret. Izin Gangguan	Rp19.150.000	Rp14.795.250	Rp15.900.000	Rp13.025.000	Rp96.451.000
33	Ret. Izin Trayek	-	-	-	Rp13.626.095	Rp19.075.000
34	Ret. Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
-	Ret. Izin Usaha Kontruksi	Rp12.600.000	-	-	-	Rp60.000.000
-	Ret. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Rp23.000.000	Rp37	Rp21.475.000	Rp24.900.000	-
-	Ret. Perizinan SIUK	-	-	-	Rp1.400.000	Rp3.650.000
-	Surat Izin Praktek Dokter	-	-	-	-	Rp200.000
-	Ret. Izin SIK,SIP,Kesehatan	-	-	-	-	Rp100.000
-	SIUP	Rp10.100.000	Rp625.000	6,700,00.00	Rp8.800.000	Rp17.950.000
-	Ret. Izin Usaha Industry	-	Rp225.000	-	-	-
-	Ret. SIUJK	-	Rp106.667	-	-	-
-	Tanda Daftar Gedung	Rp30.000	-	Rp800.000	-	-
-	Surat Izin Praktek Bidan	-	-	-	Rp8.000.000	Rp1.000.000
-	Surat Izin Praktek Perawat	-	-	-	-	Rp1.000.000
-	TDP	Rp6.400.000	Rp765.000	Rp8.450.000	Rp9.550.000	Rp25.750.000
-	Surat Izin Kerja Perawat	-	-	-	-	Rp250.000
-	TGD	-	Rp350.000	-	Rp1.350.000	Rp1.300.000

-	IUI	-	-	Rp1.350.000	Rp450.000	-
-	Bidan Kesehatan	-	-	-	Rp2.650.000	-
-	Izin Warnet	-	-	-	-	Rp600.000
C	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp4.800.000	Rp328.668.881	Rp108.961.354	Rp1.523.976.709	Rp1.874.813.330
1	Penerimaan Kontribusi Tempat Penginapan	-	Rp22.000.000	Rp2.000.000	-	-
2	PDAM	Rp4.800.000	Rp4.800.000	5,500,000.00	-	-
3	Deviden	-	Rp301.868.881	Rp101.461.354	-	-
4	Bag. Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	-	-	-	Rp2.000.000	Rp1.874.813.330
5	Bag. Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	-	-	-	Rp1.521.976.709	-
6	Bag. Hasil Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta	-	-	-	-	-
D	Jumlah Lain- Lian PAD Yang Sah	Rp500.000.000	Rp11.807.630.337	Rp6.701.253.840	Rp5.454.589.580	Rp7.707.545.065
1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	Rp10.000.000	Rp11.000.000
2	PAJAK IURAN TETAP	-	Rp5.469.775.750	-	-	-
3	PENERIMAAN JASA GIRO	Rp500.000.000	Rp4.602.785.142	-	-	-
4	Penerimaan Mma/Jasa Bunga	-	Rp1.735.069.445	-	-	-
2	Jasa Giro	-	-	Rp3.837.377.116	2,965,787,841,00	Rp2.888.886.649
5	Pendapatan Bungan	-	-	-	-	-
6	Dsb	-	-	-	-	-
-	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan-Pekerjaan	-	-	Rp268.993.152	Rp401.046.192	Rp3.039.462.914
-	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	Rp1.038.064.914
-	Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
-	Penerimaan Lai-Lain	-	-	Rp2.574.783.572	Rp2.062.859.816	Rp730.131.434
	Lelang Asset Daerah	-	-	Rp20.100.000	-	-

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rp13.676.922.539	Rp18.948.549.581	Rp22.896.577.246	Rp33.315.778.614	Rp38.284.769.512	Rp42.082.710.000	Rp32.339.291.429
Rp2.532.932.130	Rp3.648.515.441	Rp5.830.286.036	Rp5.411.353.281	Rp11.081.088.475	Rp5.180.010.000	Rp5.736.508.399
Rp47.121.500	Rp138.310.201	Rp117.677.282	Rp121.019.097	117.333,012.00	Rp83.321.000	Rp90.839.100
Rp96.653.000	Rp476.613.986	Rp626.621.385	Rp816.340.515	Rp565.377.683	Rp850.440.907	Rp929.045.422
Rp4.815.000	5,040.000.00	Rp2.100.000	Rp12.440.000	Rp12.806.400	Rp8.682.674	Rp9.489.822
Rp41.654.575	Rp45.821.725	Rp49.816.825	Rp129.608.650	Rp208.458.584	Rp190.181.151	Rp194.161.151
1.055,327,506.00	Rp1.068.868.428	Rp1.114.492.137	Rp1.188.705.371	Rp1.290.227.927	Rp1.210.653.787	Rp1.409.541.968
Rp1.031.807.278	Rp1.133.413.927	Rp1.274.989.430	Rp1.906.164.450	Rp4.014.012.919	Rp715.527.346	Rp956.802.050
Rp23.970.000	Rp37.350.000	Rp47.150.000	Rp56.500.000	Rp94.496.800	Rp78.897.816	Rp92.279.814
-	Rp1.180.000	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp1.347.895	Rp953.460	Rp953.460
-	-	-	-	-	-	-
Rp57.700.000	Rp10.360.000	-	Rp1.779.000	Rp712.350	Rp758.518.843	Rp1.061.870.189
-	-	-	Rp1.013.562.752	1.090,540,169.00	Rp324.505.523	Rp348.602.673
Rp173.883.271	Rp731.557.174	Rp2.596.038.977	1,63,833,445.00	Rp3.685.774.736	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Rp963.720.387	Rp1.845.723.265	Rp6.469.732.496	Rp8.020.595.292	Rp3.565.424.264	Rp10.577.700.000	Rp7.851.000.000
Rp434.939.449	1.079,507,077.42	Rp5.852.820.495	7,292,956,291,75	Rp3.150.036.764	-	-
-	Rp182.648.662	4,857,553,354,79	Rp6.269.015.030	Rp2.034.614.047	Rp14.173.030	Rp16.092.000
Rp78.215.000	Rp134.535.000	Rp162.240.000	Rp200.115.000	Rp215.705.000	Rp195.670.000	Rp225.670.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Rp30.150.000	Rp27.500.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp34.000.000	-	-
Rp177.400.000	Rp190.915.000	Rp211.980.000	Rp230.730.000	Rp250.710.000	-	-
Rp45.346.000	Rp53.346.000	Rp54.595.000	Rp46.776.000	Rp49.083.000	Rp22.100.000	Rp252.000.000
Rp5.215.900	Rp6.128.900	Rp2.901.100	Rp3.002.000	Rp1.616.600	Rp123.090.000	Rp136.440.000
-	-	-	-	-	Rp26.460.000	Rp30.123.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Rp3.400.000	Rp3.400.000
-	-	-	-	-	-	-
Rp98.612.549	Rp484.433.515	Rp506.551.041	Rp513.318.262	Rp564.308.117	-	-
Rp328.214.000	Rp382.744.000	Rp382.057.000	Rp526.714.000	Rp221.635.000	Rp3.750.000	Rp3.750.000
Rp135.231.000	Rp165.600.000	Rp164.862.000	Rp294.710.000	Rp108.589.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Rp43.883.000	Rp48.824.000	Rp34.945.000	Rp23.904.000	Rp34.896.000	Rp33.042.000	Rp98.557.500
Rp3.150.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.500.000	Rp4.100.000	-	-
Rp60.150.000	Rp60.300.000	Rp62.500.000	Rp89.000.000	Rp84.700.000	Rp5.200.000	Rp5.200.000
-	-	-	-	-	-	-
Rp850.000	Rp1.300.000	Rp1.150.000	Rp2.000.000	Rp1.950.000	-	Rp64.000.000
Rp30.000.000	Rp39.800.000	Rp42.000.000	Rp41.000.000	Rp17.500.000	Rp9.125.000	Rp186.250.000
-	-	-	-	-	-	-
Rp54.950.000	Rp65.350.000	Rp74.800.000	Rp74.600.000	Rp5.900.000	-	-
Rp200.548.938	Rp383.242.188	Rp252.855.000	Rp200.925.000	Rp193.752.500	-	-
103,648,437,50	159,979,687,50	Rp111.187.500	Rp120.612.500	Rp37.625.000	Rp39.298.908	Rp14.200.000
-	-	-	-	-	Rp54.945.550	Rp84.200.000
Rp88.250.500	Rp220.412.500	Rp140.867.500	Rp79.467.500	Rp155.377.500	-	-
Rp8.650.000	Rp2.850.000	Rp800.000	Rp850.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000
-	-	-	-	-	Rp14.200.000	Rp14.200.000
-	-	-	-	-	Rp1.500.000	Rp1.500.000
-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-
Rp5.071.421.259	Rp5.487.747.413	Rp7.292.662.187	Rp8.438.981.666	Rp11.310.093.699	-	-
-	-	-	-	-	Rp6.187.099.474	Rp6.933.629.177
-	-	-	-	-	-	-
Rp2.735.210	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Rp2.388.222.761	Rp4.739.058.842	Rp1.504.554.635	5.813,374,545.33	Rp1.831.507.487	-	-
-	-	-	Rp5.418.662.240	Rp7.584.401.920	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Rp6.102.342.567	-



# Titik Persentase Distribusi F

Probabilita = 0.05

Diproduksi oleh: Junaidi  
<http://junaidichaniago.wordpress.com>



**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

# Titik Persentase Distribusi t

d.f. = 1 - 200

Diproduksi oleh: Junaidi  
<http://junaidichaniago.wordpress.com>



**Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)**

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)**

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)**

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung